



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kutai Kartanegara

RENSTRA DISKOMINFO TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2025-2029



<https://diskominfo.kukarkab.go.id>



PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tim Penyusun dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 dengan baik dan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, yang menjadi teladan dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran dan kerja keras.

Dokumen Renstra ini disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 dan disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Dengan tersusunnya dokumen ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki arah pembangunan strategis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Arah kebijakan tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan dan penganggaran, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki prioritas yang jelas, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kinerja pelayanan publik.

Seluruh unit kerja dan aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat melaksanakan Renstra ini secara konsisten, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kinerja berkelanjutan. Semoga dokumen ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara serta menjadi pedoman yang bermakna bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tenggarong, 12 Januari 2025

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Solihin, S.Sos., MT

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 DASAR HUKUM 5

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... 9

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU PERANGKAT DAERAH..... 13

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 13

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah14

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah21

2.1.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara25

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan68

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan69

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah69

2.1.7 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah 69

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 70

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.....70

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.....74

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 78

3.1 TUJUAN RENSTRA PD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025–2029..... 79

3.2 SASARAN RENSTRA PD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025–2029 79

3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 83

3.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029..... 84

BAB IV PROGRAM KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 95

4.1 URAIAN PROGRAM 97

4.2 URAIAN KEGIATAN..... 100

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN 127

4.4 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH 151

4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)..... 154

4.6 KINERJA KUNCI (IKK) 157

BAB V PENUTUP 160

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Jumlah ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara.....22

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Jumlah ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara.....22

Tabel 1. 3 Rekapitulasi Aset Modal (Sarana dan Prasarana Pendukung) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 202423

Tabel 1. 4 Rekapitulasi Sarana Komunikasi dalam Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 202424

Tabel 1. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara27

Tabel 1. 6 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara48

Tabel 1. 7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara).....73

Tabel 2. 1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD77

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD81

Tabel 3. 4 Penahapan Renstra Diskominfo Kukar Berdasarkan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan (2025-2029).....91

Tabel 3. 5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD93

Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah98

Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD101

Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan128

Tabel 4. 4 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah152

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Kutai Kartanegara156

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Kutai Kartanegara158

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Untuk menjamin keterpaduan arah pembangunan di sektor ini, diperlukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen manajemen strategis yang memberikan arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan indikator kinerja selama periode lima tahun.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 mengacu pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, serta tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen teknokratis, tetapi juga merupakan instrumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah, sekaligus sarana sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan RPJMN 2025–2029 dan arah pembangunan nasional dalam RPJPN 2025–2045.

Di era globalisasi dan transformasi digital saat ini, bidang komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi salah satu faktor penentu daya saing daerah. Peran TIK mencakup negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat sipil (*civil society*), yang secara bersama-sama membentuk masyarakat informasi. Sektor komunikasi dan

informatika juga menjadi tulang punggung dalam mendorong demokratisasi, keterbukaan informasi publik, keamanan siber, serta tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Perencanaan pembangunan merupakan proses berkesinambungan yang bertujuan untuk menetapkan arah pembangunan, demi mencapai kondisi yang lebih baik. Sebagai elemen penting pembangunan, perencanaan memberikan arah yang jelas dalam perkembangan daerah, sekaligus berfungsi sebagai standar pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Tanpa perencanaan yang matang, tujuan pembangunan akan sulit dicapai.

Dilantiknya dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes sebagai Bupati Kutai Kartanegara dan H. Rendi Solihin sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang diselenggarakan pada 23 Juni 2025 maka pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025-2029 akan segera dilaksanakan. Perencanaan yang efektif harus berbasis pada data, fakta, dan informasi yang valid, akurat, serta akuntabel, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan kondisi serta potensi lokal, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Pada periode 2025-2029, pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara difokuskan pada visi sebagai berikut :

**“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata, dan Industri Hijau
yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”**

Visi ini mendukung tema pembangunan sebagaimana tertuang dalam tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045, yaitu: Penguatan Fondasi Transformasi Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk mewujudkan dua cita-cita luhur itu, telah disusun misi strategis yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penguatan ekonomi berbasis sektor non ekstraktif, tata kelola pemerintahan yang baik, pengembangan pendidikan berbasis karakter, serta pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Seiring dengan dilantiknya Kepala Daerah, maka arah kebijakan dan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan disusun dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya, RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam Rencana

Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah khususnya pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029.

Dalam rangka menjamin keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi, maka Renstra Diskominfo Kukar 2025–2029 disusun dengan memperhatikan dokumen strategis sebagai berikut:

1. Telaahan RPJMN 2025–2029

RPJMN 2025–2029 yang merupakan penjabaran teknokratik dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, menetapkan tema besar “Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Salah satu agenda prioritas nasional adalah transformasi digital melalui penguatan infrastruktur digital, pengembangan SDM digital, serta tata kelola data dan keamanan siber.

Kaitan dengan Diskominfo Kukar:

- Diskominfo Kukar memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi digital melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan infrastruktur TIK di wilayah kabupaten, serta pengelolaan keterbukaan informasi publik dan keamanan informasi.

- Kebijakan “Satu Data Indonesia” sebagai bagian dari prioritas RPJMN mendorong optimalisasi penyelenggaraan statistik sektoral dan integrasi data lintas sektor di tingkat daerah.

2. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Renstra Kementerian Kominfo selaras dengan visi Presiden dan RPJMN, yaitu mewujudkan masyarakat digital Indonesia yang berdaulat, inklusif, dan berdaya saing. Fokus strategis mencakup:

1. Akselerasi transformasi digital di sektor publik dan masyarakat;
2. Penguatan ekosistem ekonomi digital nasional;
3. Tata kelola data yang efektif dan akuntabel;

4. Peningkatan literasi digital, keamanan siber, dan perlindungan data pribadi.

Kaitan dengan Diskominfo Kukar:

1. Diskominfo Kukar perlu mengadopsi arah strategis Kemenkominfo, khususnya dalam penguatan SPBE, pengembangan SDM TIK daerah, pemanfaatan teknologi untuk layanan publik, serta literasi digital dan keamanan informasi.

2. Renstra Diskominfo Kukar dapat mengacu pada sasaran Kemenkominfo untuk menciptakan ekosistem TIK yang mendukung inovasi dan pelayanan publik yang efisien.

3. Telaahan terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2024–2026 (transisi) dan RPJMD 2026–2031 yang sedang dalam tahap perumusan, mengusung agenda strategis “Transformasi Kalimantan Timur sebagai Provinsi Hijau, Cerdas, dan Inklusif” sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN).

Kaitan dengan Diskominfo Kukar:

1. Peran Diskominfo Kukar dalam mendukung konektivitas informasi antarwilayah dan pelayanan publik digital menjadi penting, terlebih dengan posisi Kukar sebagai kabupaten mitra dan wilayah strategis IKN.

2. Agenda digitalisasi layanan publik dan integrasi data daerah diharapkan mendorong kolaborasi yang harmonis antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat

4. Telaahan terhadap Renstra Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 2025–2029 telah menetapkan arah strategis berupa:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur digital dan SPBE daerah;
2. Peningkatan kapasitas SDM dan literasi digital;
3. Penerapan kebijakan Satu Data dan interoperabilitas data daerah;
4. Penguatan keamanan informasi dan perlindungan data publik;

5. Peningkatan kualitas layanan komunikasi publik dan informasi strategis daerah.

Kaitan dengan Diskominfo Kukar:

1. Diskominfo Kukar memiliki tanggung jawab untuk mengharmonisasikan program-program prioritasnya dengan kebijakan provinsi, terutama dalam mendukung pelaksanaan SPBE, satu data daerah, dan transformasi digital pelayanan publik.

2. Kolaborasi dengan provinsi sangat penting dalam mendukung keterpaduan infrastruktur TIK, penguatan jejaring komunikasi publik, dan mitigasi risiko keamanan informasi di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap keempat dokumen tersebut, maka arah strategis Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 difokuskan pada agenda besar Transformasi Digital, yang diwujudkan melalui penguatan SPBE, peningkatan keterbukaan informasi, pengelolaan statistik sektoral yang terintegrasi, serta perlindungan dan keamanan informasi berbasis risiko

Dengan demikian, Renstra PD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, tetapi juga sebagai alat manajemen pembangunan yang outcome-oriented, acuan evaluasi kinerja, serta pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam menghadapi dinamika tantangan dan peluang pembangunan di masa depan.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai referensi Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara periode Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia TAHUN 2024 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;

23. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050—5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 No. 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 180);
30. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2043;
32. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

33. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
34. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 adalah untuk mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai dokumen manajemen strategis lima tahunan yang:

1. Menjadi pedoman arah pembangunan sektor komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Mengintegrasikan dan menyinkronkan arah kebijakan dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional maupun provinsi, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025–2029;
3. Memastikan kontribusi sektor komunikasi dan informatika dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan daerah dan nasional, khususnya transformasi digital, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan data daerah dalam kerangka Satu Data Indonesia, keamanan siber dan persandian, serta peningkatan literasi digital dan diseminasi informasi publik.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan untuk:

1. Merumuskan strategi pembangunan sektor komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang sejalan dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, serta konsisten dengan RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur;

2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika serta para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
3. Menegaskan peran strategis Diskominfo dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dan daerah, termasuk transformasi digital, tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, keamanan siber dan persandian, pengelolaan data daerah, literasi digital, serta penyediaan layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel;
4. Menjadi dasar evaluasi dan penilaian kinerja penyelenggaraan urusan Diskominfo dalam kurun waktu lima tahun, sebagai instrumen akuntabilitas kinerja dan pengukuran capaian pembangunan sektor komunikasi dan informatika di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Adapun sistematika penulisan dokumen Renstra ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian, fungsi, dan peran Renstra Perangkat Daerah dalam pembangunan, proses penyusunannya, serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lain (RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Renja PD).

1.2 Dasar Hukum

Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra, termasuk ketentuan terkait pembentukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD sebagai pedoman pelaksanaan urusan pemerintahan dalam lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Menyajikan struktur dan susunan isi dokumen Renstra PD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Menjelaskan dasar hukum, struktur organisasi, tugas, dan fungsi Dinas Kominfo sampai pada unit setingkat di bawah kepala perangkat daerah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Menyajikan kondisi sumber daya manusia, sarana-prasarana/aset, dan dukungan anggaran.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan capaian kinerja Renstra periode sebelumnya dan indikator kinerja pelayanan yang relevan (SPM, SDGs, dsb).

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Mengidentifikasi permasalahan pokok, tantangan, serta isu strategis bidang komunikasi dan informatika.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Merumuskan tujuan dan sasaran Renstra PD yang terukur untuk lima tahun, beserta indikator kerjanya.

3.2 Strategi

Menjelaskan rencana tindakan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

3.3. Arah Kebijakan

Menyajikan arah operasionalisasi kebijakan PD sesuai tugas, fungsi, NSPK, serta sasaran RPJMD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Menjabarkan program, kegiatan, dan subkegiatan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.
- 4.2. Menguraikan rencana pendanaan indikatif 2025–2029, subkegiatan prioritas, serta kesinambungan perencanaan hingga Renja 2030.
- 4.3. Menyajikan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

- Menegaskan kembali posisi Renstra sebagai pedoman pembangunan bidang komunikasi dan informatika.
- Memuat rewiu APIP terhadap Rancangan Akhir Renstra PD.
- Menyajikan penyelarasan Renstra PD dengan RPJMN 2025–2029.
- Menyajikan capaian kinerja Renstra per urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Pelayanan yang diberikan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, keterbukaan informasi publik, serta penyediaan infrastruktur dan layanan teknologi informasi yang andal guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan pelayanan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, termasuk diseminasi informasi pembangunan daerah melalui berbagai media komunikasi, pengelolaan hubungan media, serta penguatan literasi digital masyarakat. Selain itu, dinas ini berperan dalam menjamin keterbukaan dan akses informasi publik yang cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Di bidang informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan pelayanan pengembangan dan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pengelolaan pusat data, jaringan intra pemerintah, serta keamanan informasi dan persandian. Pelayanan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan integrasi layanan pemerintahan, sekaligus mendukung transformasi digital daerah. Melalui sinergi lintas perangkat daerah dan pemanfaatan teknologi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang profesional, inovatif, dan berkelanjutan demi mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, perangkat daerah ini mempunyai tugas pokok: Melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Diskominfo mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
2. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai bidang tugasnya;
3. Pengelolaan layanan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, serta persandian dan keamanan informasi;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas:

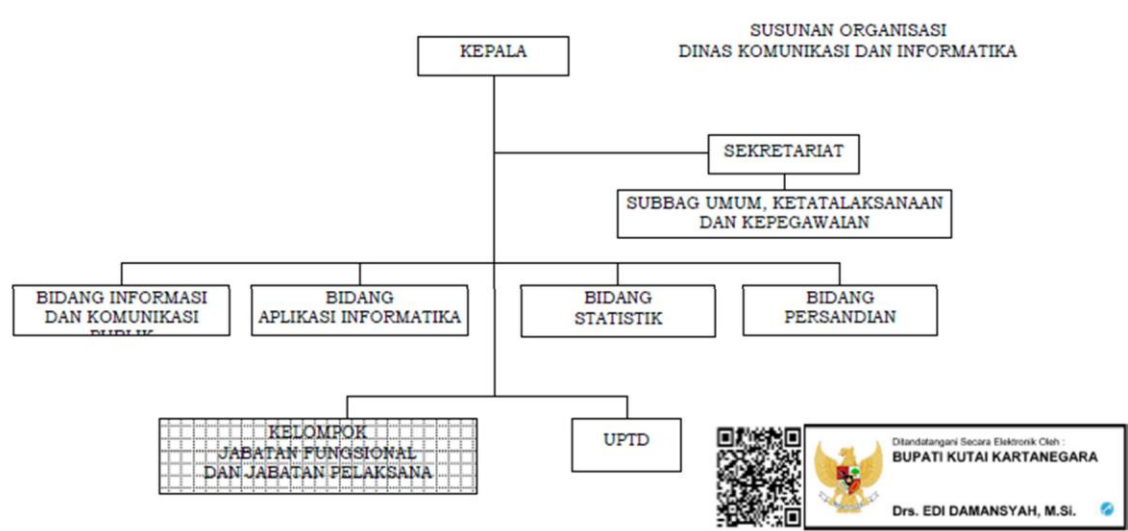
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat yang membawahkan Subbagian Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian;
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

- 4. Bidang Aplikasi Informatika;
- 5. Bidang Statistik;
- 6. Bidang Persandian;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- 8. UPTD

Gambar 2. 1

Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kutai Kartanegara



Uraian Tugas dan Fungsi

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah berbasis data dan informasi serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
2. Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi;
4. Mengoordinasikan penyusunan laporan;
5. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
6. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati, baik secara tertulis maupun lisan.

b. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris bertugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan penganggaran, keuangan, dan aset.

Fungsi:

1. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi;
2. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan PPID Pembantu;
4. Mengoordinasikan penyusunan berbagai laporan dan dokumen kinerja;
5. Mengoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pengadaan, aset, dan keuangan;
6. Mengoordinasikan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

7. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan sekretariat;
8. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Subbagian Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian

Dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris. Bertugas merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi urusan umum, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

Fungsi:

1. Melaksanakan pengumpulan data dan perumusan kebijakan teknis;
2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan fungsi PPID Pembantu;
3. Menyusun dan menghimpun dokumen perencanaan dan laporan kinerja;
4. Merencanakan dan melaksanakan berbagai subkegiatan operasional perangkat daerah;
5. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan sistem informasi kepegawaian;
6. Melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas;
7. Menyusun laporan;
8. Memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dari Sekretaris.

d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Dipimpin oleh Kepala Bidang, bertugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan dan mengevaluasi urusan tata kelola dan kemitraan komunikasi publik, pengelolaan informasi dan media.

Fungsi:

1. Menyajikan informasi komunikasi publik dan media;
2. Mengoordinasikan kebijakan teknis dan administrasi bidangnya;
3. Mengoordinasikan Reformasi Birokrasi dan fungsi PPID Utama;
4. Mengoordinasikan kegiatan komunikasi publik pemerintah daerah;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang;
6. Menyusun laporan urusan komunikasi publik;
7. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

e. Bidang Aplikasi Informatika

Dipimpin oleh Kepala Bidang, bertugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan dan mengevaluasi urusan tata kelola sistem elektronik pemerintahan, pengelolaan sumber daya TIK, dan pengembangan aplikasi.

Fungsi:

1. Menyajikan informasi urusan sistem elektronik dan TIK;
2. Mengoordinasikan kebijakan teknis dan administrasi bidangnya;
3. Mengoordinasikan Reformasi Birokrasi dan fungsi PPID Utama;
4. Menyusun analisis jabatan dan laporan sistem pengendalian intern;
5. Mengoordinasikan kegiatan pengelolaan domain dan E-Government;
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
7. Menyusun laporan bidang aplikasi informatika;
8. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

f. Bidang Statistik

Bidang Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Statistik yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Statistik memiliki tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan kelembagaan dan sumber daya statistik sektoral serta pengelolaan data statistik sektoral. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Statistik memiliki fungsi:

1. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan kelembagaan dan sumber daya statistik sektoral serta pengelolaan data statistik sektoral;
2. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan kelembagaan dan sumber daya statistik sektoral serta pengelolaan data statistik sektoral;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (termasuk e-Government, SOP, Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi, zona integritas, serta pelaksanaan fungsi PPID);
4. Mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Mengoordinasikan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Statistik (tindak lanjut audit, kepatuhan LHKPN/LHKASN, serta pengelolaan arsip);
7. Mengoordinasikan penyusunan laporan kelembagaan dan pengelolaan data statistik sektoral;
8. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang;
9. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas, baik secara tertulis maupun lisan.

g. Bidang Persandian

Bidang Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Persandian yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Persandian memiliki tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan tata kelola persandian dan operasional pengamanan informasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Bidang Persandian memiliki fungsi:

1. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan tata kelola persandian dan operasional pengamanan informasi;
2. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan tata kelola persandian dan operasional pengamanan;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan fungsi PPID;
4. Mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
 - b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
6. Mengoordinasikan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang persandian;
7. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan persandian;
8. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang;
9. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan-jabatan berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu, yang melaksanakan tugas secara mandiri dan profesional. Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari jabatan-jabatan yang bertugas memberikan dukungan administratif, pelayanan publik, serta pelaksanaan teknis kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Tugas dan fungsi dari Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Dinas. Sistem dan mekanisme kerja keduanya mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk mendukung penyederhanaan birokrasi.

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD pada Dinas Komunikasi dan Informatika diatur melalui Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara didukung oleh 65 Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2024. Komposisi berdasarkan tingkat pendidikan dan gender disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Jumlah ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara

Pendidikan	Laki-Laki	(%)	Perempuan	(%)	Jumlah	(%)
S2	9	13,85%	1	1,54%	10	15,38%
S1	18	27,69%	16	24,62%	34	52,31%
D3	4	6,15%	1	1,54%	5	7,69%
D1	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SLTA	11	16,92%	5	7,69%	16	24,62%
SLTP	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SD	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Total	42	64,62%	23	35,38%	65	100%

Sumber data: Subbag Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2024

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas ASN berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 34 orang (52,31%), diikuti oleh Pascasarjana (S2) sebanyak 10 orang (15,38%), Diploma Tiga (D3) sebanyak 5 orang (7,69%), dan lulusan SLTA sebanyak 16 orang (24,62%). Tidak terdapat ASN dengan jenjang D1, SLTP, maupun SD. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar ASN memiliki kualifikasi akademik yang cukup memadai, namun perlu peningkatan kompetensi teknis di bidang TIK, keamanan siber, big data, dan statistik sektoral untuk mendukung agenda transformasi digital dan implementasi SPBE.

Dari sisi gender, terdapat 42 orang laki-laki (64,62%) dan 23 orang perempuan (35,38%). Distribusi ini menunjukkan masih terbatasnya keterwakilan perempuan, sehingga perlu kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) melalui rekrutmen, penempatan, dan pengembangan karier.

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Jumlah ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara

Golongan	Laki-Laki	(%)	Perempuan	(%)	Jumlah	(%)
IV	7	8,86%	0	0,00%	7	8,86%

III	27	34,18%	12	15,19%	39	49,37%
II	20	25,32%	12	15,19%	32	40,51%
I	1	1,27%	0	0,00%	1	1,27%
Total	55	69,62%	24	30,38%	79	100%

Sumber data:Subbag Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2024

Selanjutnya, berdasarkan golongan kepangkatan, ASN didominasi oleh golongan III sebanyak 39 orang (49,37%), diikuti golongan II sebanyak 32 orang (40,51%), golongan IV sebanyak 7 orang (8,86%), dan golongan I sebanyak 1 orang (1,27%). Data ini menggambarkan bahwa ASN Diskominfo Kukar mayoritas berada pada tingkat pelaksana dan madya, dengan potensi besar untuk dikembangkan melalui program diklat fungsional, sertifikasi kompetensi, serta penguatan jabatan fungsional sesuai bidang keahlian.

Asset Modal (Sarana dan Prasarana Pendukung)

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Diskominfo Kukar memiliki sarana dan prasarana pendukung berupa infrastruktur TIK, gedung, dan fasilitas layanan publik. Rekapitulasi data aset pada tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 1. 3 Rekapitulasi Aset Modal (Sarana dan Prasarana Pendukung) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Tower	22 unit
2	Shelter	22 unit
3	Genset	23 unit
4	Balai Pelatihan IT	2 buah
5	PH Studio	1 buah
6	Perangkat NOC	1 unit

No	Uraian	Jumlah
7	Rack Set	7 unit
8	Router / Switch	4 / 8 unit
9	UPS	1 unit
10	Server	15 unit
11	Komputer Desktop	50 unit
12	Laptop	54 unit

Sumber data: Subbag Kepegawaian dan Umum, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2024

Sarana Komunikasi dalam Pelayanan Informasi Publik

Sebagai institusi yang menjalankan fungsi layanan informasi publik, Diskominfo Kukar mengelola berbagai sarana komunikasi yang digunakan untuk mendukung diseminasi informasi, transparansi pemerintah, serta partisipasi masyarakat. Adapun rekapitulasi sarana komunikasi hingga tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.4..

Tabel 1. 4 Rekapitulasi Sarana Komunikasi dalam Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio “RPK FM”	1 unit
2	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	70 kelompok
3	PPID Kabupaten	1 unit
4	PPID Pembantu	58 unit
5	Web Portal Kabupaten	1 unit
6	Website SKPD	1 unit
7	Web Newsroom	1 unit

No	Uraian	Jumlah
8	Internet Mobile	3 unit

Sumber data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2024

Keberadaan sarana komunikasi tersebut sangat strategis dalam membangun literasi digital masyarakat, memperkuat komunikasi publik pemerintah, dan menjamin hak masyarakat atas informasi. Namun, seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan publik, diperlukan penguatan integrasi media komunikasi, optimalisasi kanal digital, serta pengembangan ekosistem informasi publik berbasis platform digital.

Dukungan Anggaran

PBD relatif fluktuatif dan masih terkonsentrasi pada belanja operasional. Proporsi belanja untuk pengembangan infrastruktur TIK, penguatan SPBE, dan peningkatan kapasitas SDM masih terbatas. Hal ini berimplikasi pada keterbatasan inovasi layanan digital. Oleh karena itu, pada periode 2025–2029 perlu diarahkan alokasi anggaran yang lebih proporsional untuk mendukung program prioritas transformasi digital, pengelolaan data daerah, serta penguatan literasi digital masyarakat.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara merujuk pada dokumen RPJMD Kukar 2021–2026 sebagai dasar perencanaan strategis jangka menengah. Penetapan indikator ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Diskominfo dalam melaksanakan urusan wajib pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah.

Indikator kinerja yang ditetapkan mencerminkan akumulasi pencapaian dari program-program pembangunan daerah secara tahunan (outcome-based) maupun indikator kinerja mandiri tahunan, sehingga memungkinkan pengukuran progres kinerja secara periodik hingga tercapainya kondisi ideal di akhir periode RPJMD. Indikator ini juga berperan sebagai dasar evaluasi kinerja

organisasi dalam mendukung implementasi Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Agar indikator kinerja dapat memberikan gambaran yang objektif dan representatif, maka indikator yang dipilih harus memenuhi prinsip SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound). Oleh karena itu, indikator kinerja Diskominfo disusun untuk menggambarkan capaian yang terukur terhadap kualitas tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi, pelayanan informasi publik, pengelolaan aplikasi dan data daerah, serta efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi. Berikut disajikan Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam memberikan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki capaian-capaian yang dijelaskan dalam tabel T-C.23 di bawah ini. Tabel indikator kinerja pada T-C23 memuat daftar ukuran kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2022–2026. Setiap indikator dilengkapi dengan satuan ukuran, target capaian tahunan (tahun 2022 s.d. 2026), realisasi capaian pada tahun 2022 dan 2023 (serta di tahun-tahun berikutnya jika tersedia), serta rasio atau persentase capaian terhadap target tahunan.

Tujuan penyajian data ini adalah untuk menunjukkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja serta mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo. Beberapa indikator mencerminkan indeks kinerja digital seperti Indeks SPBE dan indeks masing-masing domainnya (Tata Kelola, Layanan, Manajemen, Kebijakan Internal), nilai SAKIP, hingga indikator output nyata seperti jumlah aplikasi, dokumen teknis, data statistik sektoral, layanan keamanan informasi, dan keterlibatan perangkat daerah dalam sistem digital pemerintahan. Rasio capaian dihitung sebagai perbandingan antara realisasi dan target, dalam bentuk persentase. Rasio capaian 100% menunjukkan bahwa target telah sepenuhnya tercapai, di atas 100% menunjukkan kelebihan capaian (overachievement), dan di bawah 100% menunjukkan belum tercapainya target yang ditetapkan. Data ini menjadi dasar

evaluasi kinerja Dinas, sekaligus menjadi pertimbangan dalam perencanaan lanjutan dan perumusan kebijakan pada periode berikutnya.

Tabel 1. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indeks SPBE			Tingkat	3,10	3,15	3,20	3,22	3,29	1,94	2,54	3,09			63%	81%	97%	0%	0%
	Indeks Domain Tata Kelola SPBE			Tingkat	2,96	3,01	3,06	3,11	3,16	1,50	1,40	2,20			51%	47%	72%	0%	0%
	Indeks Domain Layanan SPBE			Tingkat	3,25	3,30	3,35	3,40	3,45	2,71	3,51	3,88			83%	106%	116%	0%	0%
	Indeks Domain Manajemen SPBE			Tingkat	3,05	3,10	3,15	3,20	3,25	1,00	1,00	1,82			33%	32%	58%	0%	0%
	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE			Tingkat	2,81	2,92	3,03	3,14	3,25	1,30	3,30	3,60			0%	0%	0%	0%	0%
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			Nilai	82,00	84,00	86,00	88,00	91,00	79,18	93,95	68,17			97%	112%	79%	0%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100			100 %	100%	100 %	0%	0%
	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100			100 %	100%	100 %	0%	0%
	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100			100 %	100%	100 %	0%	0%
	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi			Persen	18,9 7	37,9 3	56,8 9	75,8 6	100, 00	18,9 7	37,9 3	56,8 9			100 %	100%	100 %	0%	0%
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen	21	16	16	10	10	21	16	16,0 0			100 %	100%	100 %	0%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			Laporan	3	2	2	2	2	3	2	2,00			100 %	100%	100 %	0%	0%
	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			Laporan	4	4	4	4	4	4	4	3,00			0%	0%	75%	0%	0%
	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1,00			100 %	100%	100 %	0%	0%
	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah			Layanan	5	5	5	5	5	5	5	5,00			100 %	100%	100 %	0%	0%
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100,00			100 %	100%	100 %	0%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12,00			0%	0%	100%	0%	0%
	Jumlah Barang Milik Daerah			Unit	100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%	0%	0%
	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola			Informasi dan Komunikasi Publik	840	840	840	840	840	840	840	840			100%	100%	100%	0%	0%
	Jumlah OPD yang mengelola e-government			OPD	58	58	58	58	58	58	58	56			100%	100%	97%	0%	0%
	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola			Sistem Informasi	100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%	0%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia			OPD	58	58	58	58	58	58	58	58			100 %	100%	100 %	0%	0%
	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah			OPD	11	11	11	11	14	11	11	11			100 %	100%	100 %	0%	0%
	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah			Layanan JKS	1	1	1	1	1	1	1	1			100 %	100%	100 %	0%	0%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen	7	6	3	3	3	7	6	3			100 %	100%	100%	0%	0%
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan			Laporan	14	10	7	10	10	10	10	7			71%	100%	100%	0%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Orang/Bulan	984	912	888	888	888	927	899	766			94%	99%	86%	0%	0%
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Laporan	3	4	4	2	4	3	4	4			100%	100%	100%	0%	0%
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Laporan	4	4	4	4	4	4	4	4			0%	0%	0%	0%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Paket	-	4	-	-	-	-	4	-			0%	0%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Orang	10	66	14	10	10	10	66	14			100%	100%	100%	0%	0%
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Paket	15	2	1	2	2	15	2	1			100%	100%	100%	0%	0%
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Paket	6	1	1	1	1	5	1	1			0%	0%	0%	0%	0%
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			Paket	1	1	1	1	1	1	1	1			0%	100%	0%	0%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Laporan	200	50	75	50	50	172	49	72			86%	98%	96%	0%	0%
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Dokumen	50	2	1	2	2	46	2	1			92%	100%	100%	0%	0%
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Unit	1	6	3	6	6	1	6	3			100 %	100%	100%	0%	0%
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Unit	93	93	25	93	93	93	93	25			0%	0%	100%	0%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1			0%	0%	0%	0%	0%
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1			0%	0%	0%	0%	0%
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Laporan	4	4	3	4	4	4	4	3			0%	0%	0%	0%	0%
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Unit	22	36	22	22	22	22	35	22			0%	0%	100%	0%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Unit	2	3	1	3	3	2	3	1			0%	0%	0%	0%	0%
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Unit	3	147	16	3	3	3	147	16			100%	100%	100%	0%	0%
	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2			0%	100%	0%	0%	0%
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			Dokumen	30	2	2	2	2	30	2	2			0%	0%	0%	0%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			Dokumen	5	2	2	2	2	5	2	2			0%	0%	100%	0%	0%
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			Dokumen	8	8	3	8	8	8	8	3			0%	0%	0%	0%	0%
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			Dokumen	3	3	73	3	3	3	3	73			0%	0%	100%	0%	0%
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			Dokumen	5	5	5	5	5	5	5	5			0%	0%	0%	0%	0%
	Jumlah Layanan Hubungan Media			Layanan	60	250	254	74	3	60	250	254			0%	0%	0%	0%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			Dokumen	270	100	100	100	100	270	100	100			0%	0%	0%	0%	0%
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1			0%	0%	0%	0%	0%
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1			0%	0%	0%	0%	0%
	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan			Dokumen	6	6	6	100	100	6	6	6			0%	0%	0%	0%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola			Unit	1	1	3	1	1	1	1	3			0%	0%	100%	0%	0%
	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			Unit	2	2	1	2	2	2	2	1			0%	0%	100%	0%	0%
	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City			Dokumen	4	4	2	4	4	4	3	2			0%	0%	100%	0%	0%
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan			Dokumen	13	3	10	11	3	10	16	10			0%	0%	0%	0%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Komunikasi Pemerintah Daerah																		
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)			Dokumen	6	66	6	6	6	6	60	6			0%	0%	0%	0%	0%
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE			Dokumen	58	2	1	2	2	58	2	1			0%	0%	100%	0%	0%
	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			Unit	24	23	59	59	59	24	59	59			100%	257%	0%	0%	0%
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi			Dokumen	4	2	4	2	2	4	2	4			0%	0%	0%	0%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																		
	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			Orang	135	130	114	114	114	135	130	122			0%	0%	0%	0%	0%
	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun			Dokumen	2	4	2	4	4	2	4	2			0%	0%	0%	0%	0%
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS			Orang	0	116	114	116	116	0	116	114			0%	0%	0%	0%	0%
	Jumlah Infrastruktur Statistik			unit	18	18	2	18	18	18	18	2			100 %	0%	0%	0%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah data Statistik Sektoral Daerah yang dihimpun			Dokumen	0	2	1	2	2	0	2	1			0%	0%	0%	0%	0%
	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1			0%	0%	0%	0%	0%
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			Laporan	11	1	1	1	1	11	1	1			0%	0%	100%	0%	0%
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1			0%	0%	0%	0%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1			0%	0%	0%	0%	0%
			1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		100	100	100	100	100	100	100	96,61	100	100					
			2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		73	73	75	85	85	73,91	73,91	87,5	85	85					

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		70,43	70,43	71,22	71,91	71,91	70,43	70,43	69,37	71,91	71,91					
			4. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
			5. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			melakukan evaluasi pembangunan daerah																
			6. Tingkat keamanan informasi pemerintah		55,6	55,6	57,8	58	58	55,6	55,6	54,88	58	58					

Kinerja Pengelolaan Keuangan

Tabel 1.6 di bawah ini memuat informasi rincian alokasi anggaran dan realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara pada masing-masing program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2022 hingga 2026. Setiap baris dalam tabel menyajikan data Jumlah anggaran yang direncanakan (kolom tahun ke-2022 hingga 2026), Realisasi penggunaan anggaran, Rasio antara realisasi dan anggaran (%), dan Rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi dari tahun ke tahun. Beberapa catatan penting dari data ini:

1. Terdapat beragam program strategis, seperti Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektor, Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, serta Pengelolaan Aplikasi Informatika.
2. Rasio realisasi terhadap anggaran rata-rata berada pada kisaran 80%–100%, yang menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran yang cukup tinggi.
3. Terdapat beberapa program atau kegiatan yang baru mulai dianggarkan pada tahun-tahun tertentu, yang ditandai dengan nilai nol atau tanda strip pada tahun-tahun sebelumnya.
4. Pada kolom rata-rata pertumbuhan, sebagian besar program mencatat pertumbuhan negatif (penurunan), mengindikasikan adanya efisiensi atau penyesuaian fiskal dalam belanja perangkat daerah.

Secara keseluruhan, tabel 1.6 memberikan gambaran kinerja pengelolaan keuangan Diskominfo Kukar, baik dari sisi perencanaan maupun realisasi, serta mencerminkan orientasi terhadap efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung tugas-tugas komunikasi, informatika, statistik, dan persandian di daerah

Tabel 1. 6 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.958.838.311	48.241.703.541	26.486.848.774	32.906.658.683	15.984.481.540	22.354.850.819	45.425.022.273	23.323.002.961	-	-						-10,54%	#DIV/0!
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	163.331.000	275.000.000	200.000.000	1.000.000.000	200.000.000	155.403.684	226.137.232	184.580.247	-	-						5,19%	#DIV/0!
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.906.000	100.000.000	100.000.000	450.000.000	100.000.000	50.300.496	76.193.150	86.157.029			88,39%	76,19%	86,16%	0,00%	0,00%	-3,04%	-100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	106.425.000	175.000.000	100.000.000	50.000.000	100.000.000	105.103.188	149.944.082	98.423.218			98,76%	85,68%	98,42%	0,00%	0,00%	-0,31%	-100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	150.000.000													

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	50.000.000													
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	250.000.000													
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	50.000.000													
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.957.730.487	10.230.351.525	11.593.896.869	11.232.668.414	11.006.217.716	8.897.264.314	8.881.862.571	9.314.431.639	-	-	81,20%	86,82%	80,34%	0,00%	0,00%	-5,07%	-100,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.675.777.323	9.839.059.361	11.282.604.705	10.671.376.250	10.694.925.552	8.633.366.714	8.532.134.070	9.028.535.039			80,87%	86,72%	80,02%	0,00%	0,00%	-5,17%	-100,00%

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	281.953.164	391.292.164	311.292.164	511.292.164	311.292.164	263.897.600	349.728.501	285.896.600			93,60 %	89,38 %	91,84 %	0,00%	0,00%	-1,64%	-100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	25.000.000	-												
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	25.000.000	-												
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	127.110.000	125.000.000	125.000.000	105.000.000	125.000.000	121.234.900	108.650.750	99.166.000	-	-	95,38 %	86,92 %	79,33 %	0,00%	0,00%	-1,18%	-100,00%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	127.110.000	125.000.000	125.000.000	30.000.000	125.000.000	121.234.900	108.650.750	99.166.000			95,38 %	86,92 %	79,33 %	0,00%	0,00%	-1,18%	-100,00%
Penyusunan Perencanaan	-	-	-	25.000.000	-												

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	50.000.000	-												
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000	1.408.142.000	150.000.000	1.150.000.000	150.000.000	132.548.000	1.307.091.752	148.441.500	-	-	88,37 %	92,82 %	98,96 %	0,00%	0,00%	-3,04%	-100,00%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	540.000.000	-	-	-		486.437.900				#DIV/0 !	90,08 %	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0!	#DIV/0!
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	868.142.000	150.000.000	1.150.000.000	150.000.000	132.548.000	820.653.852	148.441.500			88,37 %	94,53 %	98,96 %	0,00%	0,00%	-3,04%	-100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	672.360.000	9.203.410.000	900.705.462	4.980.000.000	470.000.000	647.540.525	8.654.094.922	837.283.997	-	-	96,31 %	94,03 %	92,96 %	0,00%	0,00%	-0,94%	-100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.360.000	8.382.500.000	100.000.000	3.450.000.000	100.000.000	100.632.000	7.940.386.300	96.649.750			98,31 %	94,73 %	96,65 %	0,00%	0,00%	-0,42%	-100,00%

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	197.000.000	242.119.808	550.000.000	50.000.000	98.536.100	158.544.800	233.255.564			98,54 %	80,48 %	96,34 %	0,00%	0,00%	-0,37%	-100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000	50.000.000	50.000.000	250.000.000	50.000.000	141.429.255	39.451.000	39.692.709			94,29 %	78,90 %	79,39 %	0,00%	0,00%	-1,46%	-100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	300.000.000	304.000.000	400.000.000	200.000.000	242.768.970	253.099.418	295.335.846			97,11 %	84,37 %	97,15 %	0,00%	0,00%	-0,73%	-100,00%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	70.000.000	273.910.000	204.585.654	320.000.000	70.000.000	64.174.200	262.613.404	172.350.128			91,68 %	95,88 %	84,24 %	0,00%	0,00%	-2,15%	-100,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	10.000.000	-	-	-										
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.409.217.000	21.568.710.000	7.530.094.000	2.050.000.000	450.000.000	8.242.832.425	21.084.800.992	7.239.990.992	-	-	98,02 %	97,76 %	96,15 %	0,00%	0,00%	-0,50%	-100,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana	1.009.715.000	1.000.000.000	1.830.094.000	850.000.000	250.000.000	979.912.121	985.421.730	1.803.384.952			97,05 %	98,54 %	98,54 %	0,00%	0,00%	-0,75%	-100,00%

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.399.502.000	20.568.710.000	5.700.000.000	1.200.000.000	200.000.000	7.262.920.304	20.099.379.262	5.436.606.040			98,15 %	97,72 %	95,38 %	0,00%	0,00%	-0,46%	-100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.923.705.760	2.543.386.016	4.271.139.896	10.957.190.269	3.001.463.824	2.650.337.572	2.393.981.280	3.811.857.864	-	-	90,65 %	94,13 %	89,25 %	0,00%	0,00%	-2,42%	-100,00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000			100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	742.000.000	742.000.000	1.049.748.680	2.397.726.445	742.000.000	565.037.754	733.538.759	879.160.816			76,15 %	98,86 %	83,75 %	0,00%	0,00%	-6,58%	-100,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.176.605.760	1.796.286.016	3.216.291.216	8.554.363.824	2.254.363.824	2.080.199.818	1.655.342.521	2.927.597.048			95,57 %	92,15 %	91,02 %	0,00%	0,00%	-1,13%	-100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1.555.384.064	2.887.704.000	1.716.012.547	1.431.800.000	581.800.000	1.507.689.399	2.768.402.774	1.687.250.722	-	-	96,93 %	95,87 %	98,32 %	0,00%	0,00%	-0,78%	-100,00%

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	651.800.000	1.021.746.000	131.800.000	381.800.000	131.800.000	639.458.489	988.903.244	121.215.072			98,11 %	96,79 %	91,97 %	0,00%	0,00%	-0,48%	-100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	603.584.064	1.300.000.000	1.279.172.547	550.000.000	150.000.000	590.539.710	1.250.558.190	1.266.257.750			97,84 %	96,20 %	98,99 %	0,00%	0,00%	-0,54%	-100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000	565.958.000	305.040.000	500.000.000	300.000.000	277.691.200	528.941.340	299.777.900			92,56 %	93,46 %	98,27 %	0,00%	0,00%	-1,91%	-100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	10.275.357.333	57.497.251.333	80.600.357.336	90.770.020.000	2.605.357.333	9.605.598.614	56.521.804.178	78.527.739.629	-	-	93,48 %	98,30 %	97,43 %	0,00%	0,00%	-1,67%	-100,00%

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.275.357.333	57.497.251.333	80.600.357.336	90.770.020.000	2.605.357.333	9.605.598.614	56.521.804.178	78.527.739.629	-	-	93,48 %	98,30 %	97,43 %	0,00%	0,00%	-1,67%	-100,00%
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	75.000.000	250.000.000	150.000.000		75.000.000	68.376.960	168.000.899	96.347.434			91,17 %	67,20 %	64,23 %	#DIV/0 !	0,00%	-2,28%	-100,00%
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	700.000.000	200.000.000	200.000.000		200.000.000	616.023.507	196.804.000	177.708.400			88,00 %	98,40 %	88,85 %	#DIV/0 !	0,00%	-3,14%	-100,00%
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	50.000.000	250.000.000	1.050.000.000		100.000.000	46.364.300	243.937.505	900.916.321			92,73 %	97,58 %	85,80 %	#DIV/0 !	0,00%	-1,87%	-100,00%
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	300.000.000	6.300.000.000	9.650.000.000		300.000.000	282.057.800	5.947.992.489	9.551.886.000			94,02 %	94,41 %	98,98 %	#DIV/0 !	0,00%	-1,53%	-100,00%

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	350.000.000	855.330.000	12.930.000.000	87.025.000.000	530.357.330	279.817.500	789.358.129	11.888.198.905			79,95 %	92,29 %	91,94 %	0,00%	0,00%	-5,44%	-100,00%
Pelayanan Informasi Publik	300.000.000	466.564.000	300.000.000	300.000.000	500.000.000	261.794.900	418.754.550	268.204.700			87,26 %	89,75 %	89,40 %	0,00%	0,00%	-3,35%	-100,00%
Layanan Hubungan Media	7.050.357.333	48.125.357.333	55.070.357.336		200.000.000	6.905.968.839	47.781.251.368	54.637.065.836			97,95 %	99,28 %	99,21 %	#DIV/0 !	0,00%	-0,52%	-100,00%
Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	500.000.000	600.000.000	600.000.000		300.000.000	377.080.543	565.733.400	531.681.676			75,42 %	94,29 %	88,61 %	#DIV/0 !	0,00%	-6,81%	-100,00%
Manajemen Komunikasi Krisis	350.000.000	50.000.000	50.000.000		50.000.000	283.969.125	47.745.000	33.254.000			81,13 %	95,49 %	66,51 %	#DIV/0 !	0,00%	-5,09%	-100,00%
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	250.000.000		250.000.000		250.000.000	228.068.010		212.976.713									
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	50.000.000	100.000.000	50.000.000		100.000.000	47.183.700	90.538.838	36.490.000			94,37 %	90,54 %	72,98 %	#DIV/0 !	0,00%	-1,44%	-100,00%

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	300.000.000	300.000.000	300.000.000		-	208.893.430	271.688.000	193.009.644			69,63 %	90,56 %	64,34 %	#DIV/0 !	#DIV/0 !	-8,65%	#DIV/0!
Relasi Media				200.000.000													
Kemitraan Komunikasi Dengan Komunitas Informasi Masyarakat				1.000.000.000													
Dukungan Administratif, Keuangan, Dan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik				100.000.000													
Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik				75.000.000													

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, Dan Aspirasi Publik				1.160.000.000													
Diseminasi Informasi				200.000.000													
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik				160.020.000													
Penyusunan Konten				300.000.000													
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik				250.000.000													
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA																	

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	15.704.8 27.670	34.407.59 5.670	108.824.3 52.470	173.630.7 87.670	11.858.82 7.670	14.174. 487.051	33.310.90 2.001	104.602.7 59.325	-	-	90,26 %	96,81 %	96,12 %	0,00%	0,00%	-2,53%	-100,00%
Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.104.827 .670	16.841.681 .000	68.026.629 .825	173.630.78 7.670	7.371.548. 828	7.758.52 2.885	16.231.106 .540	65.269.233 .724	-	-	85,21 %	96,37 %	95,95 %	0,00%	0,00%	-3,92%	-100,00%
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	3.276.967 .000	10.123.728 .158	39.437.683 .158		6.321.548. 828	2.888.96 4.162	10.031.766 .879	38.028.715 .835			88,16 %	99,09 %	96,43 %	#DIV/0 !	0,00%	-3,10%	-100,00%
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	325.000.0 00	175.000.00 0	9.686.000. 000		100.000.00 0	207.784. 590	94.340.000	9.336.707. 770			63,93 %	53,91 %	96,39 %	#DIV/0 !	0,00%	-10,58%	-100,00%
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	250.000.0 00	800.000.00 0	200.000.00 0		400.000.00 0	179.534. 907	619.025.67 9	136.164.71 8			71,81 %	77,38 %	68,08 %	#DIV/0 !	0,00%	-7,94%	-100,00%

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	4.902.860.670	4.742.952.842	18.352.946.667		-	3.926.775.010	4.567.827.744	17.499.139.713			80,09 %	96,31 %	95,35 %	#DIV/0 !	#DIV/0 !	-5,40%	#DIV/0!
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	100.000.000	550.000.000	100.000.000		100.000.000	92.012.286	521.733.174	94.320.938			92,01 %	94,86 %	94,32 %	#DIV/0 !	0,00%	-2,06%	-100,00%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	250.000.000	450.000.000	250.000.000		150.000.000	212.856.834	396.413.064	174.184.750			85,14 %	88,09 %	69,67 %	#DIV/0 !	0,00%	-3,94%	-100,00%
Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	500.000.000	-	-		300.000.000	250.595.096											
Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE Di Lingkungan Pemda				150.000.000													

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi Penyusunan Dan/Atau Reviu Arsitektur Dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah				300.000.00 0													
Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE				400.000.00 0													
Pembangunan Dan/Atau Pengembangan Aplikasi Khusus Yang Sesuai Dengan Arsitektur Dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah				100.000.00 0													
Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Atau Kota Cerdas				250.000.00 0													
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				61.662.278 .842													

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah Yang Terintegrasi				75.000.000													
Koordinasi Dan Fasilitasi Promosi Literasi Spbedan/Atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE				100.000.000													
Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE				110.593.508.828													
Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	6.600.000.000	17.565.914.670	40.797.722.645	-	4.487.278.842	6.415.964.166	17.079.795.461	39.333.525.601			97,21 %	97,23 %	96,41 %	#DIV/0 !	0,00%	-0,70%	-100,00%

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	6.600.000.000	17.565.914.670	40.797.722.645	-	4.487.278.842	6.415.964.166	17.079.795.461	39.333.525.601			97,21 %	97,23 %	96,41 %	#DIV/0 !	0,00%	-0,70%	-100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.383.079.000	2.132.129.000	2.300.000.000	5.250.000.000	1.150.000.000	1.483.800.790	2.290.205.287	1.947.244.470	-	-	107,28 %	107,41 %	84,66 %	0,00%	0,00%	1,77%	-100,00%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.383.079.000	2.132.129.000	2.300.000.000	5.250.000.000	1.150.000.000	1.483.800.790	2.290.205.287	1.947.244.470	-	-	107,28 %	107,41 %	84,66 %	0,00%	0,00%	1,77%	-100,00%
Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	850.000.000	459.400.000	1.600.000.000		750.000.000	750.035.467	421.336.268	1.357.465.414			88,24 %	91,71 %	84,84 %	#DIV/0 !	0,00%	-3,08%	-100,00%
Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	283.079.000	250.000.000	150.000.000		200.000.000	270.439.010	237.510.995	126.502.862			95,53 %	95,00 %	84,34 %	#DIV/0 !	0,00%	-1,14%	-100,00%

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Membangun Metadata Statistik Sektoral	250.000.000	950.394.000	200.000.000		200.000.000	201.294.833	882.609.324	178.949.992			80,52 %	92,87 %	89,47 %	#DIV/0 !	0,00%	-5,27%	-100,00%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	-	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	-	98.179.900	77.518.800			#DIV/0 !	98,18 %	77,52 %	0,00%	#DIV/0 !	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	-	372.335.000	250.000.000		-	-	284.667.300	206.807.402			#DIV/0 !	76,45 %	82,72 %	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengembangan Infrastruktur	266.921.000	400.000.000	-			262.031.480	365.901.500				98,17 %	91,48 %	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	-0,46%	#DIV/0!
Peningkatan Peran Statistik Sektoral Terhadap Sistem Statistik Nasional				1.300.000.000													
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral				3.250.000.000													

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyelenggaraan Statistik Sektoral Yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia				200.000.000													
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				300.000.000													
PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	775.000.000	700.000.000	1.050.000.000	3.050.000.000	850.000.000	724.879.992	690.173.749	1.009.529.849	-	-	93,53 %	98,60 %	96,15 %	0,00%	0,00%	-1,66%	-100,00%
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	575.000.000	500.000.000	850.000.000	2.850.000.000	650.000.000	525.783.822	490.614.603	812.776.932	-	-	91,44 %	98,12 %	95,62 %	0,00%	0,00%	-2,21%	-100,00%
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi	150.000.000	150.000.000	350.000.000	1.300.000.000	150.000.000	133.211.098	148.471.709	336.474.410			88,81 %	98,98 %	96,14 %	0,00%	0,00%	-2,92%	-100,00%

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	184.421.104	193.058.998	199.366.871			92,21 %	96,53 %	99,68 %	0,00%	0,00%	-2,01%	-100,00%
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	150.000.000	1.350.000.000	150.000.000	144.556.416	149.083.896	129.701.171			96,37 %	99,39 %	86,47 %	0,00%	0,00%	-0,92%	-100,00%
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	-	150.000.000	-	150.000.000	63.595.204		147.234.480			84,79 %	#DIV/0 !	98,16 %	#DIV/0 !	0,00%	-4,04%	-100,00%
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	199.096.170	199.559.146	196.752.917	-	-	99,55 %	99,78 %	98,38 %	0,00%	0,00%	-0,11%	-100,00%

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	199.096.170	199.559.146	196.752.917			99,55 %	99,78 %	98,38 %	0,00%	0,00%	-0,11%	-100,00%
Total	53.097.102.314	142.978.679.544	219.261.558.580	305.607.466.353	32.448.666.543	48.343.617.266	138.238.107.488	209.410.276.234	-	-	91,05 %	96,68 %	95,51 %	0,00%	0,00%	-2,32%	-100,00%

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Diskominfo memberikan layanan yang ditujukan kepada berbagai kelompok sasaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelompok sasaran layanan tersebut meliputi:

1. Masyarakat umum: Sebagai pengguna utama informasi publik, masyarakat menjadi sasaran utama dalam layanan diseminasi informasi, keterbukaan informasi publik, literasi digital, layanan aduan, serta akses terhadap infrastruktur komunikasi dan informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah.
2. Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal: Diskominfo memberikan dukungan teknis, penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengelolaan aplikasi, pengamanan informasi, serta layanan pusat data dan statistik sektoral untuk menunjang tata kelola pemerintahan yang berbasis digital melalui implementasi SPBE.
3. Pelaku Komunitas Informasi dan Media: Kelompok ini meliputi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), media massa, dan jurnalis yang menjadi mitra dalam penyebaran informasi program pembangunan daerah. Diskominfo berperan dalam membina, memfasilitasi, serta membangun kemitraan komunikasi publik yang konstruktif dan akuntabel.
4. Lembaga Pendidikan dan Komunitas Digital: Kelompok ini termasuk pelajar, mahasiswa, akademisi, serta komunitas digital lokal yang menjadi bagian penting dalam literasi digital, inovasi teknologi, dan kolaborasi pengembangan ekosistem digital daerah.
5. Pelaku Usaha dan Dunia Industri: Pelaku usaha membutuhkan dukungan informasi, data sektoral, serta kebijakan komunikasi publik yang transparan dalam berinvestasi dan mengembangkan usaha di wilayah Kukar, terutama dalam konteks kemitraan digital, e-commerce, dan layanan terpadu berbasis data.

6. Pemangku Kepentingan: Kelompok ini meliputi pemerintah pusat (Kementerian Kominfo, BSSN, BPS, dan lainnya), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta mitra swasta dan lembaga non-pemerintah yang turut mendukung transformasi digital dan penguatan sistem informasi daerah melalui berbagai program kolaboratif.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan: Diskominfo Kukar bermitra dengan Perangkat Daerah lainnya dalam pengembangan sistem informasi pemerintahan, diseminasi informasi publik, pengelolaan aplikasi dan jaringan intra-Kukar, serta dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Daerah.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah: Beberapa BUMD dan BUMDes di wilayah Kukar turut mendukung penyebaran akses TIK, layanan informasi publik, dan perluasan jaringan internet desa sebagai bagian dari misi digitalisasi wilayah perdesaan.

2.1.7 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Diskominfo Kukar menjalin kerja sama antar-daerah maupun antar-lembaga antara lain :

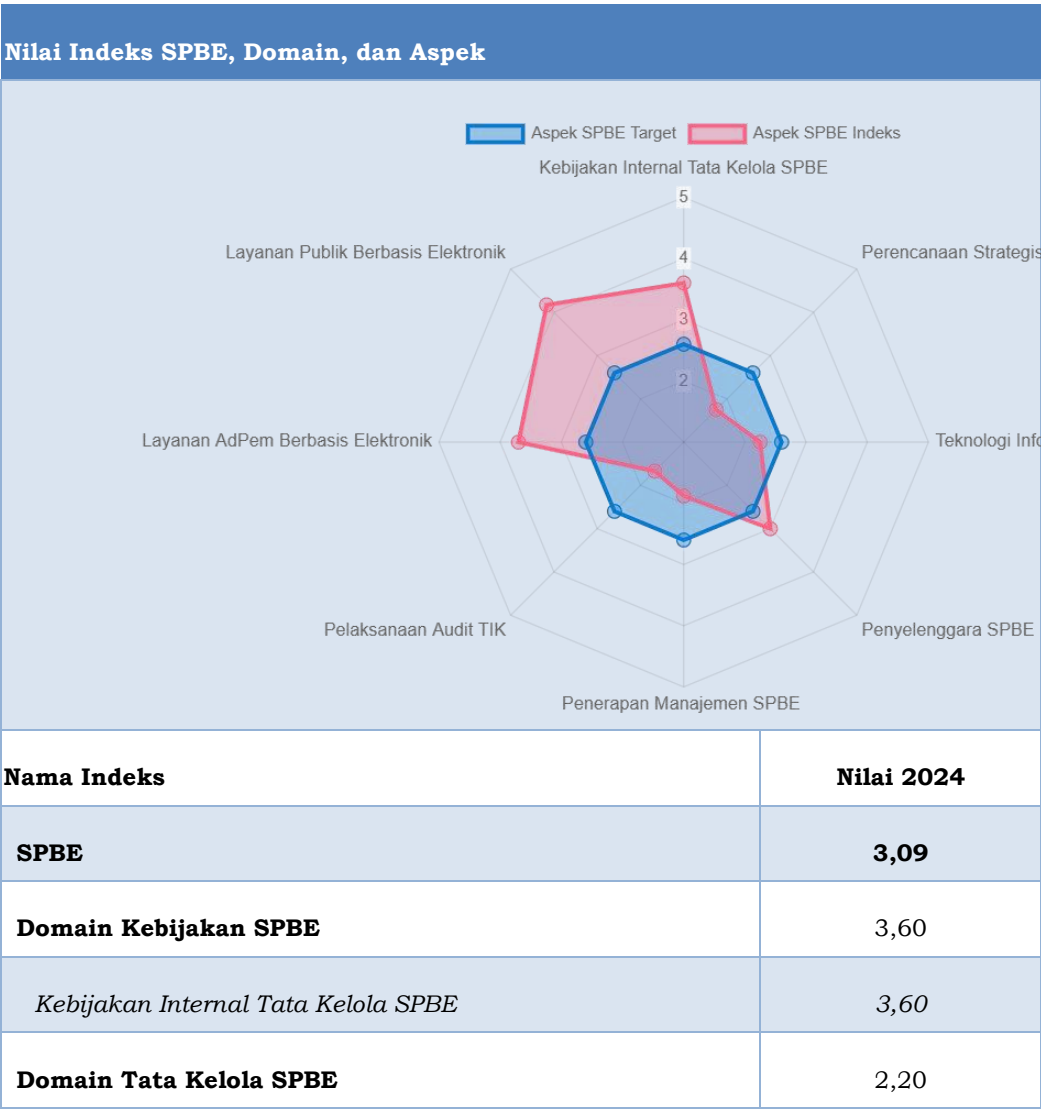
1. Kerjasama data statistik sektoral dengan Badan Pusat Statistik Kab. Kutai Kartanegara
2. Kerjasama dengan BSSN dan pemerintah provinsi dalam pembentukan TTIS (Tim Tanggap Insiden Siber) daerah.
3. Kerjasama dengan Universitas Telkom dalam penempatan dan pendayagunaan lulusan melalui skema penugasan atau diperbantukan pada perangkat daerah yang membutuhkan SDM TIK

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka perumusan rencana strategis yang efektif dan berorientasi pada hasil, langkah penting yang dilakukan adalah mengidentifikasi berbagai permasalahan pokok yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Identifikasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian indikator kinerja, serta tantangan aktual yang muncul dalam penyelenggaraan layanan publik di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi (LHE) SPBE Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dengan hasil berikut:



<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	1,75
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	2,25
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,00
Domain Manajemen SPBE	1,82
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,88
<i>Audit TIK</i>	1,67
Domain Layanan SPBE	3,88
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,70
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,17

Sumber: LHE SPBE, 2024

Hasil penilaian berdasar LHE SPBE Tahun 2024 menunjukkan adanya kelemahan (nilai rendah < 3) pada Domain Tata Kelola SPBE (2,20) pada aspek Perencanaan Strategis SPBE (1,75) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (2,25), serta kelemahan pada Domain Manajemen SPBE (1,82) pada aspek Penerapan Manajemen SPBE (1,88) dan Audit TIK (1,67). Kelemahan-kelemahan pada aspek tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Domain Tata Kelola SPBE (2,20)

a. Perencanaan Strategis SPBE (1,75)

Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum melaksanakan Perencanaan Strategis Arsitektur SPBE (indikator 11), Perencanaan Strategis Rencana dan Anggaran (indikator 13), dan Perencanaan Strategis Inovasi Proses Bisnis SPBE (indikator 14) secara lengkap sesuai dengan cakupan dan muatan referensi penyelenggaraan SPBE. Belum ada dokumentasi arsitektur SPBE sesuai dengan pedoman yang berlaku. Selain itu, penyusunan DPA/RKA belum dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK. Lebih jauh lagi, Proses Bisnis SPBE belum disusun sesuai pedoman yang berlaku

b. Teknologi Informasi dan Komunikasi (2,25)

Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum memiliki Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE (indikator 15), Layanan Pusat Data

(indikator 16), dan Layanan Jaringan Intra (indikator 17) secara lengkap sesuai dengan cakupan dan muatan referensi penyelenggaraan SPBE. Layanan pusat data dan layanan jaringan intra belum terlihat dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja. Selain itu, belum ada dokumentasi formal pengembangan aplikasi SPBE sesuai dengan siklus pengembangan aplikasi

2. Domain Manajemen SPBE (1,82)

a. Penerapan Manajemen SPBE (1,88)

Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini dapat terlihat bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum melaksanakan Penerapan Manajemen Risiko SPBE (indikator 21), Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (indikator 22), Penerapan Manajemen Data (indikator 23), Penerapan Manajemen Aset TIK (indikator 24), Penerapan Kompetensi SDM (indikator 25), Penerapan Manajemen Pengetahuan (indikator 26), Penerapan Manajemen Perubahan (indikator 27), serta Penerapan Manajemen Layanan SPBE (indikator 28) sesuai dengan cakupan dan muatan referensi penyelenggaraan SPBE. Kabupaten Kutai Kartanegara belum mulai menerapkan manajemen perubahan SPBE. Pada aspek manajemen untuk indikator-indikator lainnya, Kabupaten Kutai Kartanegara telah mulai menerapkan manajemen SPBE namun belum memenuhi cakupan sesuai acuan penyelenggaraan SPBE.

b. Audit TIK (1,67)

Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum melaksanakan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE (indikator 29) dan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE (indikator 30) sesuai dengan cakupan dan muatan referensi penyelenggaraan SPBE. Kabupaten Kutai Kartanegara belum melakukan audit infrastruktur SPBE maupun audit aplikasi SPBE.

Berdasarkan temuan kelemahan-kelemahan di atas, kemudian dilakukan analisis pemetaan permasalahan pokok, permasalahan turunan, serta akar permasalahan yang disajikan secara sistematis dalam tabel berikut:

Tabel 1. 7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Lemahnya Domain Tata Kelola SPBE (2,20)	Lemahnya Perencanaan Strategis SPBE (1,75)	▪ Belum adanya dokumen Rencana Induk SPBE yang komprehensif dan berkesinambungan. ▪ Perencanaan SPBE belum sepenuhnya terintegrasi dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. ▪ Minimnya koordinasi antar-perangkat daerah dalam penyusunan rencana SPBE. ▪ Kapasitas SDM perencana SPBE masih terbatas.
	Lemahnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (2,25)	▪ Infrastruktur TIK (jaringan, server, pusat data) belum merata dan optimal. ▪ Anggaran untuk pengembangan TIK relatif terbatas. ▪ Belum ada standarisasi platform/aplikasi sehingga terjadi duplikasi sistem. ▪ Rendahnya pemanfaatan TIK di unit kerja perangkat daerah.
Lemahnya Domain Manajemen SPBE (1,82)	Lemahnya Penerapan Manajemen SPBE (1,88)	▪ Belum tersedianya regulasi teknis atau SOP yang jelas terkait manajemen SPBE. ▪ Rendahnya kepatuhan perangkat daerah dalam menerapkan manajemen SPBE. ▪ Keterbatasan SDM pengelola SPBE yang memahami manajemen risiko, arsitektur SPBE, dan tata kelola data. ▪ Koordinasi pengelolaan SPBE lintas perangkat daerah masih lemah.
	Lemahnya Audit TIK (1,67)	▪ Belum terbentuk tim audit internal TIK yang kompeten. ▪ Keterbatasan instrumen, pedoman, dan metodologi audit TIK.

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		▪ Minimnya komitmen untuk melakukan evaluasi rutin terhadap sistem/aplikasi yang berjalan. ▪ Kurangnya integrasi antara hasil audit dengan perencanaan pengembangan TIK berikutnya.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara Kartanegara untuk periode 2023-2042 menjelaskan arah perencanaan wilayah. Fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayah serta sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan utama terkait penggunaan ruang. Dalam upaya menggerakkan pembangunan daerah, melibatkan RTRW untuk membantu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam konteks RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, tujuan penataan ruang Kabupaten tersebut dirinci sebagai berikut.

“Mewujudkan daerah mitra Ibukota Negara (IKN) yang handal dan pemerataan pembangunan yang terintegrasi di seluruh wilayah daerah, berbasis kawasan andalan dengan mengembangkan sektor industri, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan.”

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu : Pengembangan sistem jaringan prasarana dengan strategi meliputi : *“meningkatkan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi yang terdapat di kawasan perkotaan dan perdesaan”*

Berdasarkan hasil telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis, capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan 120 indikator (54,55 persen) sudah dilaksanakan dan sudah tercapai (SS), dan meningkat menjadi 128 indikator (58,18 persen) berdasarkan proyeksi tahun 2029.

Penguatan sistem jaringan telekomunikasi ini harus mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memuat isu-isu strategis lingkungan, potensi risiko ekologis, serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Setiap rencana pengembangan infrastruktur, termasuk infrastruktur digital dan komunikasi, wajib mengakomodasi prinsip kehati-hatian, keadilan antar generasi, dan perlindungan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dengan demikian, penyusunan dan pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara harus mengacu dan selaras dengan arah kebijakan RTRW serta memperhatikan hasil KLHS agar pembangunan sektor komunikasi dan informatika tetap berorientasi pada keberlanjutan dan daya saing wilayah dalam mendukung transformasi menuju Kukar sebagai mitra IKN yang cerdas dan tangguh

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, analisis kebijakan nasional dan daerah (RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS Kabupaten Kutai Kartanegara), maka isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. Ketimpangan Akses dan Kualitas Layanan TIK: Masih belum meratanya akses dan kualitas infrastruktur digital, khususnya di wilayah pedesaan dan blankspot, menjadi kendala utama dalam mewujudkan transformasi digital inklusif dan pemerintahan berbasis elektronik yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
2. Keterbatasan Ekosistem dan Tata Kelola SPBE: Rendahnya integrasi sistem, belum optimalnya infrastruktur SPBE, serta lemahnya perencanaan dan regulasi internal menyebabkan rendahnya efisiensi dan akuntabilitas layanan publik digital.
3. Rendahnya Literasi Digital dan Ketahanan Informasi Publik: Kurangnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi secara produktif, serta tingginya penyebaran hoaks dan disinformasi, membutuhkan penguatan literasi digital dan komunikasi publik berbasis nilai keterbukaan dan partisipatif.

4. Keamanan Siber dan Kesiapan Infrastruktur Data yang Lemah: Ketergantungan pada teknologi luar, kurangnya SDM persandian, serta ketiadaan pusat data dan sistem pengamanan informasi strategis, membuat Kukar rentan terhadap ancaman kebocoran data dan serangan siber.
5. Tata Kelola dan Interoperabilitas Data yang Belum Optimal: Implementasi kebijakan Satu Data Daerah masih lemah karena rendahnya integrasi data antar-OPD, minimnya data sektoral yang akurat, dan lemahnya kapasitas statistik pemerintah daerah.
6. Minimnya Kolaborasi Multipihak dalam Transformasi Digital: Kurangnya kemitraan strategis dengan sektor swasta, komunitas IT, akademisi, dan lembaga masyarakat membatasi pengembangan ekosistem inovasi dan pemanfaatan potensi ekonomi digital lokal.
7. Kesiapan Diskominfo dalam Mendukung Pembangunan IKN: Kapasitas kelembagaan dan infrastruktur komunikasi Diskominfo Kukar belum sepenuhnya siap untuk mendukung kebutuhan sistem komunikasi dan informasi publik berskala regional dalam konteks Kukar sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN).

Tabel 2. 1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
		RELEVAN DENGAN PD	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Dukungan penerapan Smart Regency & Infrastruktur Digital	Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan Layanan Jasa Keuangan	Peningkatan Layanan Jasa Keuangan	Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Optimalisasi tata kelola dan birokrasi pemerintahan, penguatan kehidupan berdemokrasi, dan perwujudan keamanan dan ketertiban berbasis pelayanan publik terdigitalisasi

Sumber:

- 1. Rancangan akhir RPJMD Kab.Kukar 2025-2029

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dalam perencanaan jangka menengah daerah sangat penting untuk memastikan arah pembangunan yang efektif dan efisien. Hubungannya dengan pelaksanaan tugas perangkat daerah memastikan sinergi dalam pembangunan, sementara keterkaitannya dengan RPJPD dan RPJMD menjamin keberlanjutan pembangunan yang sesuai dengan visi jangka panjang dan prioritas lima tahunan daerah. Ketentuan Pasal 1 Permendagri No. 86 Tahun 2017 mendefinisikan bahwa Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Visi dan misi RPJMD menjadi landasan utama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah :

KUKAR IDAMAN TERBAIK

“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Diskominfo memiliki peran strategis sebagai pengungkit melalui penyediaan layanan komunikasi dan informatika yang terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan. Secara khusus, keterkaitan langsung Diskominfo tercermin pada **Misi ke-3 RPJMD**, yaitu

“Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara”.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Misi ke-3 RPJMD, strategi pembangunan daerah yaitu **“Penerapan digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas”** menjadi dasar penting bagi penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika. Strategi ini menegaskan peran Diskominfo

sebagai motor penggerak transformasi digital pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sejalan dengan strategi tersebut, arah kebijakan RPJMD berupa **“Digitalisasi layanan publik”** menjadi fokus utama Diskominfo dalam merancang dan melaksanakan program dan kegiatan strategis. Diskominfo berperan dalam penyediaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, integrasi sistem aplikasi layanan publik, pengelolaan data dan informasi pemerintahan, serta penguatan keamanan informasi guna mendukung layanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Melalui penerapan digitalisasi layanan publik, Diskominfo turut mendukung penguatan sistem pengawasan internal pemerintahan berbasis teknologi informasi, yang memungkinkan proses monitoring, evaluasi, dan pengendalian kinerja pemerintahan dilakukan secara lebih efektif dan terukur. Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan RPJMD tersebut menjadi pedoman utama dalam penyusunan Renstra Diskominfo agar selaras dengan tujuan pembangunan daerah serta mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

3.1 Tujuan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029

Tujuan utama Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 adalah:

“Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan”

Tujuan utama Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 adalah meningkatkan digitalisasi tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan. Tujuan ini diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi.

3.2 Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029

Berdasarkan tujuan di atas, ditetapkan empat sasaran utama yang hendak dicapai selama periode perencanaan lima tahunan, yaitu:

1. Meningkatnya Pelayanan Publik Pemerintahan;
2. Meningkatnya Akses Telekomunikasi dan Informasi Kepada Masyarakat;
3. Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Pembangunan;
4. Meningkatnya Tingkat Keamanan Persandian.

Tujuan dan sasaran tersebut disusun berdasarkan hasil analisis terhadap visi dan misi kepala daerah, isu-isu strategis yang telah diidentifikasi, serta mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan tata kelola pemerintahan digital. Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan kinerja pelayanan komunikasi dan informatika yang andal, inklusif, dan terintegrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2025–2029 sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan		Indeks Pemerintah Digital (Indeks)	3,09	1,40	1,70	2,10	2,50	2,90	3,10	
			Indeks Satu Data Indonesia (Nilai)	42,91	45,00	51,00	56,00	61,00	66,00	71,00	
			Indeks Keamanan Informasi (Indeks)	401	436	451	477	504	540	584	
		Meningkatnya Pelayanan Publik Pemerintahan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Masyarakat (Nilai)	-	1,00	2,00	2,60	3,00	3,30	3,60	
			Indeks Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (Nilai)	-	1,13	1,50	1,90	2,40	2,90	3,10	
		Meningkatnya Akses Telekomunikasi dan Informasi	Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas	-	74,63	75,42	76,17	76,91	77,77	78,52	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Kepada Masyarakat	yang pernah menggunakan internet selama 3 bulan terakhir (%)								
			Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (%)	-	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	
		Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Pembangunan	Indeks Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi (Nilai)	-	1,20	1,40	1,70	2,00	2,30	2,60	
		Meningkatnya Tingkat Keamanan Persandian	Indeks Keamanan Siber (Nilai)	-	1,40	1,60	2,00	2,20	2,40	2,60	

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam rangka mencapai tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu meningkatkan digitalisasi tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan, ditetapkan empat strategi utama yang saling terintegrasi dan berkelanjutan.

Strategi pertama, **“Mewujudkan ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi dan berkelanjutan”** diarahkan pada pengembangan dan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lintas perangkat daerah. Strategi ini mencakup penyelarasan arsitektur SPBE, penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta pengembangan aplikasi pemerintahan yang terstandar dan saling terhubung guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Strategi kedua, **“Memperkuat sistem informasi publik yang transparan, inklusif, dan responsif”**, difokuskan pada peningkatan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah. Melalui strategi ini, Diskominfo berupaya memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi publik yang akurat dan mudah diakses, memperluas jangkauan diseminasi informasi pembangunan, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan berbagai kanal komunikasi digital yang adaptif terhadap kebutuhan publik.

Strategi ketiga, **“Mempercepat implementasi Satu Data Indonesia dan penguatan statistik sektoral”**, diarahkan pada penguatan tata kelola data pembangunan daerah. Strategi ini meliputi peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyediaan data, standarisasi metadata dan interoperabilitas data, serta peningkatan kualitas statistik sektoral sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang berbasis data dan bukti.

Strategi keempat, **“Penguatan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah”**, ditujukan untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pemerintahan. Strategi ini dilaksanakan melalui pengembangan kebijakan dan sistem keamanan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber dan persandian,

serta penerapan manajemen risiko keamanan informasi guna mendukung keberlangsungan layanan digital pemerintahan secara aman dan andal.

Strategi dan Arah Kebijakan sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena menentukan cara pencapaian sasaran pembangunan secara efektif. Strategi berperan sebagai langkah utama, sedangkan Arah Kebijakan sebagai panduan implementasi yang lebih detail. Keduanya harus berhubungan erat dengan Isu Strategis agar pembangunan daerah dapat menjawab tantangan yang ada. Dengan strategi yang tepat dan arah kebijakan yang jelas, pembangunan daerah dapat berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Berdasarkan identifikasi peluang eksternal dan permasalahan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, berikut adalah rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kominfo Kukar Tahun 2025–2029 untuk menjawab tantangan, memanfaatkan peluang, serta menjabarkan isu dan permasalahan utama yang telah diidentifikasi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Strategi 1: Mewujudkan Ekosistem Pemerintahan Digital yang Terintegrasi dan Berkelanjutan

Arah Kebijakan:

1. Penguatan tata kelola SPBE melalui integrasi layanan, sistem, dan kelembagaan berbasis arsitektur SPBE nasional serta penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi.
2. Peningkatan ketersediaan, keandalan, dan keamanan infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah untuk mendukung keterhubungan layanan SPBE.

3. Peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital melalui optimalisasi portal pelayanan terpadu dan pemenuhan standar interoperabilitas.
4. Penguatan integrasi dan interoperabilitas aplikasi pemerintah daerah sesuai arsitektur SPBE untuk mendukung efisiensi dan efektivitas layanan publik.
5. Peningkatan literasi digital ASN dan masyarakat serta perluasan kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, IKN, dan komunitas TIK.
6. Peningkatan ketersediaan akses internet yang merata, andal, dan aman untuk mendukung penyelenggaraan SPBE dan layanan publik digital.
7. Penyusunan dan penerapan kebijakan tata kelola SPBE daerah yang selaras dengan arsitektur SPBE nasional, termasuk perencanaan, proses bisnis, dan penganggaran.
8. Penguatan kolaborasi multipihak dalam penyelenggaraan smart city melalui pemanfaatan TIK dan inovasi layanan berbasis data.
9. Peningkatan integrasi dan interoperabilitas data lintas perangkat daerah untuk mendukung keterpaduan layanan publik digital.
10. Peningkatan kualitas tata kelola TIK pemerintah daerah melalui pelaksanaan audit TIK secara berkala sesuai standar dan kewenangan.

Strategi 2: Memperkuat Sistem Informasi Publik yang Transparan, Inklusif, dan Responsif

Arah Kebijakan:

1. Penguatan hubungan dan kemitraan strategis dengan media massa untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.
2. Peningkatan peran KIM dalam diseminasi informasi program prioritas daerah dan pemberdayaan komunikasi publik berbasis komunitas.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan Komisi Informasi Daerah dalam penyelesaian sengketa informasi publik yang transparan, adil, dan akuntabel.

4. Peningkatan kualitas layanan informasi publik yang cepat, transparan, dan inklusif berbasis pemanfaatan teknologi digital.
5. Peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat serta aparaturnya terhadap regulasi bidang informasi dan komunikasi publik.
6. Pengembangan sistem monitoring dan analisis opini publik untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan diseminasi informasi publik secara masif, terstruktur, dan berbasis berbagai kanal komunikasi digital maupun konvensional.
8. Optimalisasi pengelolaan media komunikasi publik pemerintah daerah (website, media sosial, dan kanal resmi lainnya) untuk mendukung keterbukaan informasi.
9. Penyusunan strategi komunikasi publik yang adaptif dan berorientasi pada peningkatan partisipasi masyarakat dan citra positif pemerintah daerah.
10. Pengembangan konten komunikasi publik yang kreatif, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat melalui berbagai media.
11. Peningkatan kapasitas SDM komunikasi publik melalui sosialisasi, pelatihan, sertifikasi, dan penguasaan teknologi komunikasi digital.

Strategi 3: Mempercepat Implementasi Satu Data Indonesia dan Penguatan Statistik Sektoral

Arah Kebijakan:

1. Penguatan koordinasi dan pembinaan terhadap produsen data daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia;
2. Penguatan tata kelola pengelolaan statistik sektoral agar selaras dengan sistem statistik nasional.
3. Pengembangan sistem integrasi dan interoperabilitas data sektoral dan spasial berbasis prinsip Satu Data Indonesia.
4. Peningkatan kualitas data, metadata, dan kapasitas SDM statistik sektoral melalui pembinaan teknis dan sertifikasi.

5. Penguatan kelembagaan statistik perangkat daerah melalui regulasi, organisasi, serta koordinasi lintas OPD.
6. Penerapan standar proses bisnis statistik sektoral mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga diseminasi data.
7. Penguatan koordinasi dan kolaborasi antar-perangkat daerah, BPS, serta pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan statistik sektoral.

Strategi 4: Penguatan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

Arah Kebijakan:

1. Implementasi pengendalian keamanan informasi berbasis risiko untuk melindungi data dan sistem pemerintah daerah.
2. Penguatan pengelolaan SDM, infrastruktur, dan anggaran keamanan informasi serta pembentukan TTIS daerah sesuai kebutuhan.
3. Peningkatan kualitas, keandalan, dan ketersediaan layanan keamanan informasi dan persandian yang responsif terhadap ancaman.
4. Penyusunan dan penerapan kebijakan, standar, serta pedoman tata kelola keamanan informasi dan persandian daerah.
5. Pelaksanaan operasional layanan keamanan informasi dan persandian secara berkelanjutan dengan dukungan SDM kompeten dan kolaborasi dengan lembaga nasional.

Matriks Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Ekosistem Pemerintahan Digital yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	Penguatan tata kelola SPBE melalui integrasi layanan, sistem, dan kelembagaan berbasis arsitektur SPBE nasional serta penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi.
	Peningkatan ketersediaan, keandalan, dan keamanan infrastruktur jaringan intra pemerintah

Strategi	Arah Kebijakan
	daerah untuk mendukung keterhubungan layanan SPBE.
	Peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital melalui optimalisasi portal pelayanan terpadu dan pemenuhan standar interoperabilitas.
	Penguatan integrasi dan interoperabilitas aplikasi pemerintah daerah sesuai arsitektur SPBE untuk mendukung efisiensi dan efektivitas layanan publik.
	Peningkatan literasi digital ASN dan masyarakat serta perluasan kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, IKN, dan komunitas TIK.
	Peningkatan ketersediaan akses internet yang merata, andal, dan aman untuk mendukung penyelenggaraan SPBE dan layanan publik digital.
	Penyusunan dan penerapan kebijakan tata kelola SPBE daerah yang selaras dengan arsitektur SPBE nasional, termasuk perencanaan, proses bisnis, dan penganggaran.
	Penguatan kolaborasi multipihak dalam penyelenggaraan smart city melalui pemanfaatan TIK dan inovasi layanan berbasis data.
	Peningkatan integrasi dan interoperabilitas data lintas perangkat daerah untuk mendukung keterpaduan layanan publik digital.
	Peningkatan kualitas tata kelola TIK pemerintah daerah melalui pelaksanaan audit TIK secara berkala sesuai standar dan kewenangan.
Memperkuat Sistem Informasi Publik yang Transparan, Inklusif, dan Responsif	Penguatan hubungan dan kemitraan strategis dengan media massa untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.
	Peningkatan peran KIM dalam diseminasi informasi program prioritas daerah dan pemberdayaan komunikasi publik berbasis komunitas.

Strategi	Arah Kebijakan
	Penguatan kapasitas kelembagaan Komisi Informasi Daerah dalam penyelesaian sengketa informasi publik yang transparan, adil, dan akuntabel.
	Peningkatan kualitas layanan informasi publik yang cepat, transparan, dan inklusif berbasis pemanfaatan teknologi digital.
	Peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat serta aparatur terhadap regulasi bidang informasi dan komunikasi publik.
	Pengembangan sistem monitoring dan analisis opini publik untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
	Peningkatan diseminasi informasi publik secara masif, terstruktur, dan berbasis berbagai kanal komunikasi digital maupun konvensional.
	Optimalisasi pengelolaan media komunikasi publik pemerintah daerah (website, media sosial, dan kanal resmi lainnya) untuk mendukung keterbukaan informasi.
	Penyusunan strategi komunikasi publik yang adaptif dan berorientasi pada peningkatan partisipasi masyarakat dan citra positif pemerintah daerah.
	Pengembangan konten komunikasi publik yang kreatif, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat melalui berbagai media.
	Peningkatan kapasitas SDM komunikasi publik melalui sosialisasi, pelatihan, sertifikasi, dan penguasaan teknologi komunikasi digital.
Mempercepat Implementasi Satu Data Indonesia dan Penguatan Statistik Sektor	Penguatan tata kelola pengelolaan statistik sektoral agar selaras dengan sistem statistik nasional.
	Pengembangan sistem integrasi dan interoperabilitas data sektoral dan spasial berbasis prinsip Satu Data Indonesia.

Strategi	Arah Kebijakan
	Peningkatan kualitas data, metadata, dan kapasitas SDM statistik sektoral melalui pembinaan teknis dan sertifikasi.
	Penguatan kelembagaan statistik perangkat daerah melalui regulasi, organisasi, serta koordinasi lintas OPD.
	Penerapan standar proses bisnis statistik sektoral mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga diseminasi data.
	Penguatan koordinasi dan kolaborasi antar-perangkat daerah, BPS, serta pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan statistik sektoral.
Penguatan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Implementasi pengendalian keamanan informasi berbasis risiko untuk melindungi data dan sistem pemerintah daerah.
	Penguatan pengelolaan SDM, infrastruktur, dan anggaran keamanan informasi serta pembentukan TTIS daerah sesuai kebutuhan.
	Peningkatan kualitas, keandalan, dan ketersediaan layanan keamanan informasi dan persandian yang responsif terhadap ancaman.
	Penyusunan dan penerapan kebijakan, standar, serta pedoman tata kelola keamanan informasi dan persandian daerah.
	Pelaksanaan operasional layanan keamanan informasi dan persandian secara berkelanjutan dengan dukungan SDM kompeten dan kolaborasi dengan lembaga nasional.

Dengan strategi dan arah kebijakan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan internal dan eksternal, serta menjadi penggerak utama dalam percepatan transformasi digital daerah yang mendukung tata kelola pemerintahan yang cerdas, transparan, dan inklusif.

Tabel 3. 4 Penahapan Renstra Diskominfo Kukar Berdasarkan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan (2025-2029)

No	Strategi	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	Mewujudkan Ekosistem Pemerintahan Digital yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	Penguatan tata kelola SPBE melalui integrasi layanan, sistem, dan kelembagaan berbasis arsitektur SPBE nasional serta penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi.	Peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital melalui optimalisasi portal pelayanan terpadu dan pemenuhan standar interoperabilitas.	Peningkatan literasi digital ASN dan masyarakat serta perluasan kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, IKN, dan komunitas TIK.	Penyusunan dan penerapan kebijakan tata kelola SPBE daerah yang selaras dengan arsitektur SPBE nasional, termasuk perencanaan, proses bisnis, dan penganggaran.	Peningkatan integrasi dan interoperabilitas data lintas perangkat daerah untuk mendukung keterpaduan layanan publik digital.
		Peningkatan ketersediaan, keandalan, dan keamanan infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah untuk mendukung keterhubungan layanan SPBE.	Penguatan integrasi dan interoperabilitas aplikasi pemerintah daerah sesuai arsitektur SPBE untuk mendukung efisiensi dan efektivitas layanan publik.	Peningkatan ketersediaan akses internet yang merata, andal, dan aman untuk mendukung penyelenggaraan SPBE dan layanan publik digital.	Penguatan kolaborasi multipihak dalam penyelenggaraan smart city melalui pemanfaatan TIK dan inovasi layanan berbasis data.	Peningkatan kualitas tata kelola TIK pemerintah daerah melalui pelaksanaan audit TIK secara berkala sesuai standar dan kewenangan.
2	Memperkuat Sistem Informasi Publik yang Transparan, Inklusif, dan Responsif	Penguatan hubungan dan kemitraan strategis dengan media massa untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.	Penguatan kapasitas kelembagaan Komisi Informasi Daerah dalam penyelesaian sengketa informasi publik yang transparan, adil, dan akuntabel.	Peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat serta aparaturnya terhadap regulasi bidang informasi dan komunikasi publik.	Peningkatan diseminasi informasi publik secara masif, terstruktur, dan berbasis berbagai kanal komunikasi digital maupun konvensional.	Penyusunan strategi komunikasi publik yang adaptif dan berorientasi pada peningkatan partisipasi masyarakat dan citra positif pemerintah daerah.
		Peningkatan peran KIM dalam diseminasi informasi program prioritas daerah dan pemberdayaan komunikasi publik berbasis komunitas.	Peningkatan kualitas layanan informasi publik yang cepat, transparan, dan inklusif berbasis pemanfaatan teknologi digital.	Pengembangan sistem monitoring dan analisis opini publik untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.	Optimalisasi pengelolaan media komunikasi publik pemerintah daerah (website, media sosial, dan kanal resmi lainnya) untuk mendukung keterbukaan informasi.	Pengembangan konten komunikasi publik yang kreatif, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat melalui berbagai media.

No	Strategi	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
3	Peningkatan Implementasi Satu Data Indonesia dan Penguatan Statistik Sektoral	Penguatan tata kelola pengelolaan statistik sektoral agar selaras dengan sistem statistik nasional.	Pengembangan sistem integrasi dan interoperabilitas data sektoral dan spasial berbasis prinsip Satu Data Indonesia.	Penguatan kelembagaan statistik perangkat daerah melalui regulasi, organisasi, serta koordinasi lintas OPD.	Penerapan standar proses bisnis statistik sektoral mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga diseminasi data.	Penguatan koordinasi dan kolaborasi antar-perangkat daerah, BPS, serta pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan statistik sektoral.
4	Penguatan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Implementasi pengendalian keamanan informasi berbasis risiko untuk melindungi data dan sistem pemerintah daerah.	Penguatan pengelolaan SDM, infrastruktur, dan anggaran keamanan informasi serta pembentukan TTIS daerah sesuai kebutuhan.	Peningkatan kualitas, keandalan, dan ketersediaan layanan keamanan informasi dan persandian yang responsif terhadap ancaman.	Penyusunan dan penerapan kebijakan, standar, serta pedoman tata kelola keamanan informasi dan persandian daerah.	Pelaksanaan operasional layanan keamanan informasi dan persandian secara berkelanjutan dengan dukungan SDM kompeten dan kolaborasi dengan lembaga nasional.

Pola Penahapan:

- **Tahap I (2025):** *Fondasi:* regulasi, pemetaan, kebijakan, baseline SDM/infrastruktur.
- **Tahap II (2026):** *Implementasi awal:* integrasi dasar, pembentukan kelembagaan, sistem digital inklusif.
- **Tahap III (2027):** *Penguatan:* interoperabilitas, monitoring, sertifikasi, layanan digital lebih luas.
- **Tahap IV (2028):** *Optimalisasi:* kolaborasi multipihak, smart city, konten kreatif, integrasi penuh lintas OPD.
- **Tahap V (2029):** *Konsolidasi & keberlanjutan:* ekosistem SPBE, Satu Data, komunikasi publik, dan keamanan informasi matang & berkelanjutan.

Penahapan ini didesain agar capaian strategi dan arah kebijakan Diskominfo Kukar bersifat progresif dan terintegrasi dari tahun ke tahun, dengan mempertimbangkan kesiapan SDM, infrastruktur, regulasi, serta dukungan kolaborasi multipihak.

Tabel 3. 5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD Kukar	Arah Kebijakan Renstra PD (Diskominfo Kukar)	Ket.
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Digitalisasi layanan publik	1. Penguatan tata kelola SPBE melalui integrasi layanan, sistem, dan kelembagaan berbasis arsitektur SPBE nasional serta penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi. 2. Peningkatan ketersediaan, keandalan, dan keamanan infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah untuk mendukung keterhubungan layanan SPBE. 3. Peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital melalui optimalisasi portal pelayanan terpadu dan pemenuhan standar interoperabilitas. 4. Penguatan integrasi dan interoperabilitas aplikasi pemerintah daerah sesuai arsitektur SPBE untuk mendukung efisiensi dan efektivitas layanan publik. 5. Peningkatan literasi digital ASN dan masyarakat serta perluasan kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, IKN, dan komunitas TIK.	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD Kukar	Arah Kebijakan Renstra PD (Diskominfo Kukar)	Ket.
			6. Peningkatan ketersediaan akses internet yang merata, andal, dan aman untuk mendukung penyelenggaraan SPBE dan layanan publik digital. 7. Penyusunan dan penerapan kebijakan tata kelola SPBE daerah yang selaras dengan arsitektur SPBE nasional, termasuk perencanaan, proses bisnis, dan penganggaran. 8. Penguatan kolaborasi multipihak dalam penyelenggaraan smart city melalui pemanfaatan TIK dan inovasi layanan berbasis data. 9. Peningkatan integrasi dan interoperabilitas data lintas perangkat daerah untuk mendukung keterpaduan layanan publik digital. 10. Peningkatan kualitas tata kelola TIK pemerintah daerah melalui pelaksanaan audit TIK secara berkala sesuai standar dan kewenangan.	

BAB IV

PROGRAM KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

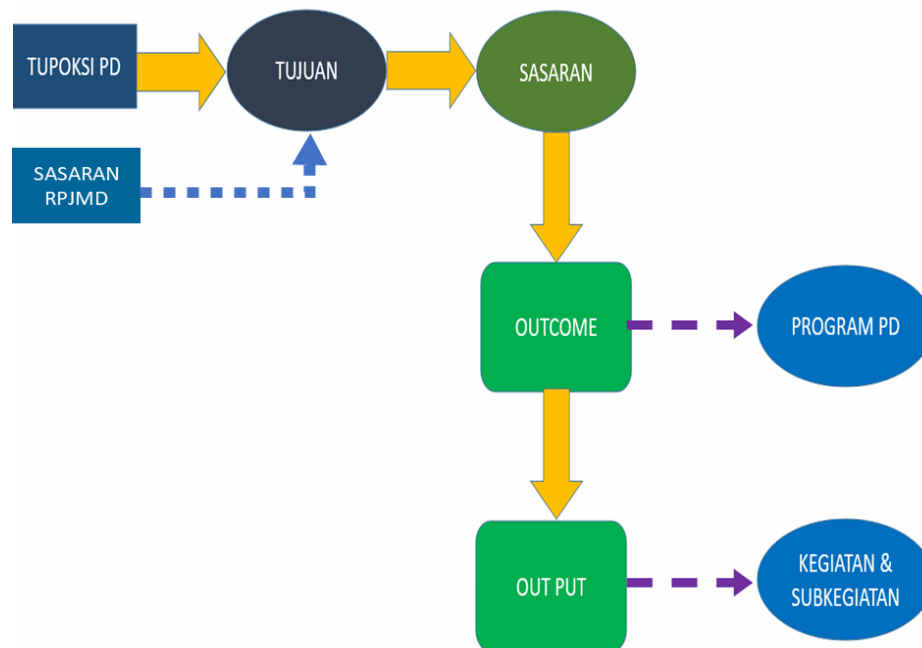
Bab ini memuat arah pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2025–2029 yang dirumuskan secara sistematis, logis, dan terstruktur berdasarkan hasil perumusan tujuan dan sasaran dalam bab sebelumnya. Penyusunan program dan kegiatan merupakan hasil cascading dari kerangka logis perencanaan yang dimulai dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Perangkat Daerah dan sasaran dalam dokumen RPJMD, kemudian dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, outcome, dan output.

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun mengacu pada nomenklatur resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku, dan menyesuaikan dengan dinamika pemutakhiran regulasi. Setiap outcome dan output yang ditetapkan mengarah langsung pada pencapaian kinerja perangkat daerah dan merupakan bagian dari sistem pertanggungjawaban pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel.

Untuk menjamin kesinambungan dan keberlanjutan perencanaan, program dan kegiatan yang dirancang hingga tahun 2029 juga mencakup pijakan awal penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2030. Dengan demikian, program dan kegiatan di tahun terakhir periode Renstra ini menjadi bagian integral dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan kesiapan menghadapi periode perencanaan selanjutnya.

Visualisasi kerangka hubungan antara tujuan, sasaran, outcome, output, program, kegiatan, dan subkegiatan ditampilkan dalam Gambar di bawah ini untuk memberikan gambaran alur logis perencanaan yang menjadi dasar penyusunan dokumen ini.

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
PD



Gambar di atas menggambarkan alur perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang dimulai dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi PD) serta sasaran RPJMD, kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran PD. Dari sasaran tersebut ditetapkan outcome (hasil antara), lalu diturunkan menjadi output yang konkret. Outcome dan output inilah yang menjadi dasar penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan, yang wajib mengacu pada Permendagri terkait nomenklatur.

Diagram ini menekankan pentingnya keterkaitan hierarkis antar level perencanaan, serta perlunya menjaga kesinambungan hingga tahun terakhir periode Renstra (tahun 2030), yang akan menjadi pijakan penyusunan Renja (Rencana Kerja) tahun tersebut.

4.1 Uraian Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana ditetapkan dalam Bab III. Setiap program diarahkan untuk menghasilkan *outcome* yang berkontribusi terhadap sasaran RPJMD 2025–2029, serta mendukung pencapaian *Sasaran Pembangunan Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika*.

Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					51.298.010.636,00		50.651.332.967,65		51.119.506.502,73		54.151.408.001,89		57.573.154.840,95	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.584.422.466,00		28.368.863.241,65		28.524.921.084,73		29.535.554.923,89		30.676.137.202,95	
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	68,17	74,00	75,00	28.584.422.466,00	78	28.368.863.241,65	80	28.524.921.084,73	81	29.535.554.923,89	82	30.676.137.202,95	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					2.155.000.000,00		1.939.440.778,00		2.095.498.624,00		3.106.132.454,00		4.246.714.734,00	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Cakupan Akses Informasi dan Komunikasi Publik (%)	5	5	5	2.155.000.000,00	5	1.939.440.778,00	5	2.095.498.624,00	5	3.106.132.454,00	5	4.246.714.734,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					20.558.588.170,00		20.343.028.948,00		20.499.086.794,00		21.509.720.624,00		22.650.302.904,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi intormatika	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan secara online (%)	58	56	56	20.558.588.170,00	56	20.343.028.948,00	56	20.499.086.794,00	56	21.509.720.624,00	56	22.650.302.904,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					2.281.000.000,00		2.065.440.778,00		2.221.498.624,00		3.232.132.454,00		4.372.714.734,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					2.281.000.000,00		2.065.440.778,00		2.221.498.624,00		3.232.132.454,00		4.372.714.734,00	
Tercapainya kolaborasi integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,31	2,31	2,60	2.281.000.000,00	2,6	2.065.440.778,00	2,75	2.221.498.624,00	2,75	3.232.132.454,00	2,9	4.372.714.734,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					1.485.000.000,00		1.269.440.778,00		1.425.498.624,00		2.436.132.454,00		3.576.714.734,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK					1.485.000.000,00		1.269.440.778,00		1.425.498.624,00		2.436.132.454,00		3.576.714.734,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGAMANAN INFORMASI														
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) (%)			26,79	1.485.000.000,00	44,64	1.269.440.778,00	71,43	1.425.498.624,00	89,29	2.436.132.454,00	100	3.576.714.734,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
TOTAL KESELURUHAN					55.064.010.636		53.986.214.524		54.766.503.751		59.819.672.910		65.522.584.309	

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran operasional dari program yang dilaksanakan untuk menghasilkan *output* yang terukur. Setiap kegiatan dilaksanakan oleh bidang terkait sesuai fungsi teknis masing-masing. Total Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak **12 Kegiatan**.

Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika							
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan				Indeks Pemerintah Digital (Indeks)		
					Indeks Satu Data Indonesia (Nilai)		
					Indeks Keamanan Informasi (Indeks)		
		Meningkatnya Pelayanan Publik Pemerintahan			Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Masyarakat (Nilai)		
					Indeks Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (Nilai)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien		Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.16.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.16.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.16.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi intormatika		Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan secara online (%)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Terselenggaranya layanan Perangkat Daerah secara online	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
					Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Akses Telekomunikasi dan Informasi Kepada Masyarakat			Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet selama 3 bulan terakhir (%)		
					Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (%)		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Cakupan Akses Informasi dan Komunikasi Publik (%)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Tersedianya saluran media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
					Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
					Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
					Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi intormatika		Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan secara online (%)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Terselenggaranya layanan Perangkat Daerah secara online	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
					Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
		Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Pembangunan			Indeks Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi (Nilai)		
			Tercapainya kolaborasi integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan daerah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
					Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Meningkatnya Tingkat Keamanan Persandian			Indeks Keamanan Siber (Nilai)		
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) (%)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				Terlaksananya sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI)	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Penggunaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

4.3 Uraian Subkegiatan

Total Sub Kegiatan pada Renstra yang mendukung pelaksanaan Program Kerja sebanyak **55 Subkegiatan** didistribusikan secara proporsional berdasarkan beban kerja dan Tugas dan Fungsi masing – masing Unit Perangkat Daerah. Adapun Rencana Program dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 terlampir pada tabel dibawah :

Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					51.298.010.636,00		50.651.332.967,65		51.119.506.502,73		54.151.408.001,89		57.573.154.840,95			
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.584.422.466,00		28.368.863.241,65		28.524.921.084,73		29.535.554.923,89		30.676.137.202,95			
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	68,17	74,00	75,00	28.584.422.466,00	78,00	28.368.863.241,65	80,00	28.524.921.084,73	81,00	29.535.554.923,89	82,00	30.676.137.202,95	2.16.2.20.2.21.01 .0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					500.000.000,00		500.000.000,00		656.057.843,00		550.000.000,00		550.000.000,00			
Tersedianya dokumen perencanaan,penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	4	4	500.000.000,00	4	500.000.000,00	4	656.057.843,00	4	550.000.000,00	4	550.000.000,00			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	81		81		81		81		81				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7	4	3		3		3		3		3				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	2		2		2		2		2				
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					150.000.000,00		150.000.000,00		306.057.843,00		150.000.000,00		150.000.000,00		Tenggarong	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	306.057.843,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00			
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		Tenggarong	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7	4	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00			
2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		Tenggarong	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	4	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00			
2.16.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		Tenggarong	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.16.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		Tenggarong	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	81	100.000.000,00	81	100.000.000,00	81	100.000.000,00	81	100.000.000,00	81	100.000.000,00			
2.16.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		Tenggarong	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.772.522.466,00		11.106.217.716,00		11.106.217.716,00		11.106.217.716,00		11.106.217.716,00			
Tersedianya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (Laporan)	4	4	4	10.772.522.466,00	4	11.106.217.716,00	4	11.106.217.716,00	4	11.106.217.716,00	4	11.106.217.716,00			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	766	768	1.078		1.078		1.078		1.078		1.078				
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					10.361.230.302,00		10.694.925.552,00		10.694.925.552,00		10.694.925.552,00		10.694.925.552,00		Tenggarong	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	766	768	1.078	10.361.230.302,00	1.078	10.694.925.552,00	1.078	10.694.925.552,00	1.078	10.694.925.552,00	1.078	10.694.925.552,00			
2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					411.292.164,00		411.292.164,00		411.292.164,00		411.292.164,00		411.292.164,00		Tenggarong	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (Laporan)	4	4	4	411.292.164,00	4	411.292.164,00	4	411.292.164,00	4	411.292.164,00	4	411.292.164,00			
2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					125.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	2	2	125.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00			
2.16.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					125.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGARA	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	2	2	125.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00			
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					700.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00			
Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	14	30	43	700.000.000,00	15	800.000.000,00	15	800.000.000,00	15	800.000.000,00	15	800.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0		3		3		3		3				
2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		Tenggarong	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	0,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00			
2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					700.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEG ARA	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	14	30	43	700.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00			
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					800.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		1.895.000.000,00		1.257.273.961,00			
Terlaksananya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2	1	800.000.000,00	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	1	1.895.000.000,00	1	1.257.273.961,00			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	72	25	68		75		75		75		75				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	2	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	1		0		0		1		1				
2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					150.000.000,00		0,00		0,00		845.000.000,00		207.273.961,00		Tenggarong	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	845.000.000,00	1	207.273.961,00			
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					200.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		Tenggarong	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	200.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00			
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					200.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		Tenggarong	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2	1	200.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00			
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		Muara Muntai	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	72	25	68	200.000.000,00	75	250.000.000,00	75	250.000.000,00	75	400.000.000,00	75	400.000.000,00			
2.16.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		Tenggarong	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	2	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00		0,00		0,00		221.691.682,00		2.000.000.000,00			
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	25	11		0,00		0,00		0,00	1	221.691.682,00	10	2.000.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.16.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		0,00		221.691.682,00		2.000.000.000,00		Tenggarong	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	25	11		0,00		0,00		0,00	1	221.691.682,00	10	2.000.000.000,00			
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					15.005.100.000,00		13.980.845.525,65		13.980.845.525,73		13.980.845.525,89		13.980.845.525,95			
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	15.005.100.000,00	0	13.980.845.525,65	0	13.980.845.525,73	0	13.980.845.525,89	0	13.980.845.525,95			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3	3		3		3		3		3				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.100.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Tenggarong	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	5.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		Tenggarong	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00			
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					14.000.000.000,00		12.980.845.525,65		12.980.845.525,73		12.980.845.525,89		12.980.845.525,95		KAB. KUTAI KARTANEG ARA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3	3	14.000.000.000,00	3	12.980.845.525,65	3	12.980.845.525,73	3	12.980.845.525,89	3	12.980.845.525,95			
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					681.800.000,00		1.031.800.000,00		1.031.800.000,00		881.800.000,00		881.800.000,00			
Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	22	15	20	681.800.000,00	22	1.031.800.000,00	22	1.031.800.000,00	22	881.800.000,00	22	881.800.000,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	16	15	24		24		24		24		24				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3	0		1		1		1		1				
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					381.800.000,00		381.800.000,00		381.800.000,00		381.800.000,00		381.800.000,00		Tenggarong	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	22	15	20	381.800.000,00	22	381.800.000,00	22	381.800.000,00	22	381.800.000,00	22	381.800.000,00			
2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0,00		350.000.000,00		350.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		Tenggarong	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3	0	0,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00			
2.16.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		Tenggarong	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	16	15	24	300.000.000,00	24	300.000.000,00	24	300.000.000,00	24	300.000.000,00	24	300.000.000,00			
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					2.155.000.000,00		1.939.440.778,00		2.095.498.624,00		3.106.132.454,00		4.246.714.734,00			
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Cakupan Akses Informasi dan Komunikasi Publik (%)	5	5	5	2.155.000.000,00	5	1.939.440.778,00	5	2.095.498.624,00	5	3.106.132.454,00	5	4.246.714.734,00	2.16.2.20.2.21.01 .0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota					2.155.000.000,00		1.939.440.778,00		2.095.498.624,00		3.106.132.454,00		4.246.714.734,00			
Tersedianya saluran media	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	0	1	1	2.155.000.000,00	1	1.939.440.778,00	1	2.095.498.624,00	1	3.106.132.454,00	1	4.246.714.734,00			
	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	0	2	1		1		1		1		1				
	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	0	2	2		2		2		2		2				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	0	5	5		1		1		1		1				
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	73	250	1		5		5		5		5				
	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	16	16	10		6		6		6		6				
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	0	20	50		5		5		5		5				
	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	0	850	850		850		850		850		850				
	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	0	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	5	5	5		5		5		5		5				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	0	11	10		2		2		2		2				
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGARA	
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	0	5	5	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat					200.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGARA	
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	0	20	50	200.000.000,00	5	125.000.000,00	5	125.000.000,00	5	125.000.000,00	5	125.000.000,00			
2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik					70.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGARA	
Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	0	1	1	70.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEG ARA	
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	5	5	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00			
2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik					50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEG ARA	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	0	2	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik					1.000.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEG ARA	
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	0	11	10	1.000.000.000,00	2	550.000.000,00	2	550.000.000,00	2	550.000.000,00	2	550.000.000,00			
2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEG ARA	
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	0	2	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00			
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik					100.000.000,00		379.440.778,00		535.498.624,00		1.546.132.454,00		2.686.714.734,00		KAB. KUTAI KARTANEG ARA	
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	73	250	1	100.000.000,00	5	379.440.778,00	5	535.498.624,00	5	1.546.132.454,00	5	2.686.714.734,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEG ARA	
Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	0	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten					85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEG ARA	
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	0	850	850	85.000.000,00	850	85.000.000,00	850	85.000.000,00	850	85.000.000,00	850	85.000.000,00			
2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEG ARA	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	16	16	10	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00			
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					20.558.588.170,00		20.343.028.948,00		20.499.086.794,00		21.509.720.624,00		22.650.302.904,00			
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan secara online (%)	58	56	56	20.558.588.170,00	56	20.343.028.948,00	56	20.499.086.794,00	56	21.509.720.624,00	56	22.650.302.904,00	2.16.2.20.2.21.01 .0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					20.558.588.170,00		20.343.028.948,00		20.499.086.794,00		21.509.720.624,00		22.650.302.904,00			
Terselenggaranya layanan Perangkat Daerah secara online	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	59	56	56	20.558.588.170,00	56	20.343.028.948,00	56	20.499.086.794,00	56	21.509.720.624,00	56	22.650.302.904,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	0	1	1		3		3		3		3				
	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	0	0	0		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	0	0	0		0		1		0		1				
	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	0	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	0	3	1		1		1		1		1				
	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	0	6	1		1		1		1		1				
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	0	56	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan /atau Portal Data Nasional (Layanan)	0	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	0	56	56		56		56		56		56				
2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGARA	
Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	0	3	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota					6.807.278.842,00		4.807.278.842,00		4.757.278.842,00		4.807.278.842,00		4.807.278.842,00		KAB. KUTAI KARTANEGARA	
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	59	56	56	6.807.278.842,00	56	4.807.278.842,00	56	4.757.278.842,00	56	4.807.278.842,00	56	4.807.278.842,00			
2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi					50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGARA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	0	2	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00			
2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo					0,00		0,00		150.000.000,00		0,00		150.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGARA	
Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	0	0	0	0,00	0	0,00	1	150.000.000,00	0	0,00	1	150.000.000,00			
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE					75.000.000,00		400.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGARA	
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	0	1	1	75.000.000,00	3	400.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00			
2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan					0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGARA	
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung	0	0	0	0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)															
2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGARA	
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	0	6	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet					12.851.309.328,00		13.985.750.106,00		14.241.807.952,00		15.352.441.782,00		16.343.024.062,00		KAB. KUTAI KARTANEGARA	
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	0	56	56	12.851.309.328,00	56	13.985.750.106,00	56	14.241.807.952,00	56	15.352.441.782,00	56	16.343.024.062,00			
2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah					300.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGARA	
Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	0	2	300.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00			
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas					275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGARA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	0	56	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00			
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					2.281.000.000,00		2.065.440.778,00		2.221.498.624,00		3.232.132.454,00		4.372.714.734,00			
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					2.281.000.000,00		2.065.440.778,00		2.221.498.624,00		3.232.132.454,00		4.372.714.734,00			
Tercapainya kolaborasi integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,31	2,31	2,60	2.281.000.000,00	2,60	2.065.440.778,00	2,75	2.221.498.624,00	2,75	3.232.132.454,00	2,90	4.372.714.734,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					2.281.000.000,00		2.065.440.778,00		2.221.498.624,00		3.232.132.454,00		4.372.714.734,00			
Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan daerah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0	100	100	2.281.000.000,00	100	2.065.440.778,00	100	2.221.498.624,00	100	3.232.132.454,00	100	4.372.714.734,00			
	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	0	0	0		1		1		1		1				
	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	114	130	170		275		275		275		275				
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	0	0	100		100		100		100		100				
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	0	0	100		100		100		100		100				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	0	1	100		100		100		100		100				
2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional					150.000.000,00		200.000.000,00		273.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGARA	
Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	0	0	100	150.000.000,00	100	200.000.000,00	100	273.000.000,00	100	350.000.000,00	100	400.000.000,00			
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia					350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGARA	
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	0	0	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	400.000.000,00	100	450.000.000,00			
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral					1.381.000.000,00		865.440.778,00		873.498.624,00		1.232.132.454,00		2.047.714.734,00		KAB. KUTAI KARTANEGARA	
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0	100	100	1.381.000.000,00	100	865.440.778,00	100	873.498.624,00	100	1.232.132.454,00	100	2.047.714.734,00			
2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral					300.000.000,00		400.000.000,00		475.000.000,00		900.000.000,00		975.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGARA	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	114	130	170	300.000.000,00	275	400.000.000,00	275	475.000.000,00	275	900.000.000,00	275	975.000.000,00			
2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar					100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGARA	
Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan	0	1	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	200.000.000,00	100	250.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	kegiatan statistik sektoral (%)															
2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		Muara Muntai	
Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	0	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00			
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					1.485.000.000,00		1.269.440.778,00		1.425.498.624,00		2.436.132.454,00		3.576.714.734,00			
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					1.485.000.000,00		1.269.440.778,00		1.425.498.624,00		2.436.132.454,00		3.576.714.734,00			
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) (%)			26,79	1.485.000.000,00	44,64	1.269.440.778,00	71,43	1.425.498.624,00	89,29	2.436.132.454,00	100	3.576.714.734,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1.335.000.000,00		1.169.440.778,00		1.305.498.624,00		2.216.132.454,00		3.151.714.734,00			
Terlaksananya sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI)	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	0	0	2	1.335.000.000,00	2	1.169.440.778,00	2	1.305.498.624,00	2	2.216.132.454,00	2	3.151.714.734,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	1	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	2	12		1		1		1		1				
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	1	1	56		56		56		56		56				
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					150.000.000,00		180.000.000,00		220.000.000,00		471.691.676,00		800.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGARA	
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	2	12	150.000.000,00	1	180.000.000,00	1	220.000.000,00	1	471.691.676,00	1	800.000.000,00			
2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan					150.000.000,00		150.000.000,00		171.057.846,00		280.000.000,00		557.273.956,00		KAB. KUTAI KARTANEGARA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	0	0	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	171.057.846,00	2	280.000.000,00	2	557.273.956,00			
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					985.000.000,00		719.440.778,00		769.440.778,00		1.184.440.778,00		1.369.440.778,00		KAB. KUTAI KARTANEG ARA	
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	1	1	56	985.000.000,00	56	719.440.778,00	56	769.440.778,00	56	1.184.440.778,00	56	1.369.440.778,00			
2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					50.000.000,00		120.000.000,00		145.000.000,00		280.000.000,00		425.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEG ARA	
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	1	0	1	50.000.000,00	1	120.000.000,00	1	145.000.000,00	1	280.000.000,00	1	425.000.000,00			
2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					150.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		220.000.000,00		425.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Penggunaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	1	1	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	220.000.000,00	1	425.000.000,00			
2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					150.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		220.000.000,00		425.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEG ARA	
Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	1	1	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	220.000.000,00	1	425.000.000,00			
Total Anggaran					55.064.010.63 6,00		53.986.214.52 3,65		54.766.503.75 0,73		59.819.672.90 9,89		65.522.584.30 8,95			

4.4 Uraian Program Dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama pengampu Program Dedikasi pada **Misi ke-5, yaitu Program Internet Desa Gratis**, yang merupakan bagian strategis dalam mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program ini diarahkan untuk memperluas akses layanan telekomunikasi dan informasi hingga ke wilayah perdesaan, khususnya daerah yang masih memiliki keterbatasan akses jaringan internet.

Di samping berperan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama pengampu Program Internet Desa Gratis pada Misi ke-5, Dinas Komunikasi dan Informatika juga memiliki peran strategis sebagai OPD pendukung dalam pelaksanaan berbagai program prioritas lainnya yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pada: **Misi 1 Program Stimulus Komunitas Kreatif , Misi 3 Program Pelayanan Publik Cerdas** dan **Misi 4 Program RT Ku-Terbaik.**

Tabel 4. 4 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	MISI	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PROYEK STRATEGIS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(6)	(7)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika						
1.	MISI 5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan	Program Internet Desa Gratis	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	1. Mapping Desa dengan Akses Internet 2. Penyusunan Perencanaan Teknis Penyediaan Internet Gratis Desa 3. Desain kebijakan keberlanjutan pengelolaan Internet Desa ke Pemerintah Desa 4. Pembangunan Fasilitas Internet Desa Gratis	OPD Utama
2.	MISI 1. Terbaik dalam pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial	Program Stimulus Komunitas Kreatif		2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Pembangunan Portal Ekraf Kukar sebagai Pusat Promosi Seluruh Karya Kreatif Kukar	OPD Pendukung
3.	MISI 3. Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;	Program Pelayanan Publik Cerdas;		2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dukungan Sistem Informasi Terintegrasi dan Jaringan Internet	OPD Pendukung

NO	MISI	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PROYEK STRATEGIS	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
4.	MISI 4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal;	Program RT Ku-Terbaik		2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Penyediaan Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program RT berbasis Digital	OPD Pendukung

4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Diskominfo memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Diskominfo memiliki Tujuan :

“Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan.”

Untuk **Sasaran 1, Meningkatnya Pelayanan Publik Pemerintahan**, indikator kinerja difokuskan pada tingkat pemanfaatan dan kualitas layanan publik berbasis digital. Hal ini mencerminkan sejauh mana sistem pemerintahan berbasis elektronik telah diimplementasikan secara efektif dalam mendukung pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Pada **Sasaran 2, Meningkatnya Akses Telekomunikasi Dan Informasi Kepada Masyarakat**, indikator kinerja diarahkan pada ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur serta layanan komunikasi dan informatika. Indikator ini menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap jaringan telekomunikasi dan informasi, khususnya melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mengurangi kesenjangan akses informasi antarwilayah.

Untuk **Sasaran 3, Meningkatnya Pemanfaatan Data Dan Informasi Pembangunan**, indikator kinerja difokuskan pada tingkat ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan data pembangunan daerah. Hal ini mencakup penerapan prinsip Satu Data Indonesia, peningkatan kualitas statistik sektoral, serta penggunaan data dan informasi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based policy).

Selanjutnya, pada **Sasaran 4, Meningkatnya Tingkat Keamanan Persandian**, indikator kinerja diarahkan pada tingkat keandalan sistem keamanan informasi pemerintah daerah. Indikator ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam melindungi data dan informasi strategis dari berbagai ancaman,

serta menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Kutai Kartanegara

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika									
1	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	3,09	1,40	1,70	2,10	2,50	2,90	3,10	
2	Indeks Satu Data Indonesia	Nilai	42,91	45,00	51,00	56,00	61,00	66,00	71,00	
3	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	401	436	451	477	504	540	584	
4	Indeks Keamanan Siber	Nilai	-	1,40	1,60	2,00	2,20	2,40	2,60	
5	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Masyarakat	Nilai	-	1,00	2,00	2,60	3,00	3,30	3,60	
6	Indeks Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Nilai	-	1,20	1,40	1,70	2,00	2,30	2,60	
7	Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet selama 3 bulan terakhir	%	-	74,63	75,42	76,17	76,91	77,77	78,52	
8	Indeks Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Nilai	-	1,13	1,50	1,90	2,40	2,90	3,10	
9	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	%	-	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	

4.6 Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika disusun sebagai tolak ukur kinerja strategis yang merepresentasikan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo dalam Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu 3 IKK pada Urusan Komunikasi dan Informatika, 1 IKK pada Urusan Statistik dan 1 IKK pada Urusan Persandian.

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Kutai Kartanegara

NO	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	SATUAN	Base Line	Target Tahun						Ket
			Tahun 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	0	0	4,00	7,00	10,71	14,29	17,86	

NO	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	SATUAN	Base Line	Target Tahun						Ket
			Tahun 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,31	2,31	2,60	2,60	2,75	2,75	2,90	
5	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	62,17	47,59	49,23	52,07	55,02	58,95	63,75	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik sektoral yang selaras dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Renstra ini menjadi instrumen strategis untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui percepatan transformasi digital pemerintahan.

Secara keseluruhan, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan digitalisasi tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan Renstra ini diharapkan mampu memperkuat integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, meningkatkan kualitas layanan informasi publik, mewujudkan tata kelola data pembangunan yang terstandar melalui implementasi Satu Data Indonesia, serta menjamin keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Kaidah Pelaksanaan :

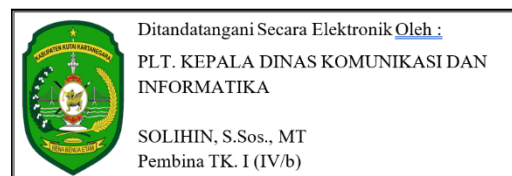
Dalam kaidah pelaksanaannya, Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja), penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pelaksanaan Renstra dilakukan secara terpadu dengan perangkat daerah terkait, berorientasi pada hasil (result oriented), serta memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pengendalian dan evaluasi :

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan secara berkelanjutan melalui mekanisme pemantauan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Evaluasi dilakukan secara periodik untuk menilai capaian kinerja terhadap indikator yang telah ditetapkan, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan program pada periode berikutnya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen dan sinergi yang kuat dalam pelaksanaannya, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara secara berkelanjutan.

Tenggarong, 12 Januari 2025





PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 216/SK-BUP/HK/2025
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sampai dengan 2029, serta untuk lebih efektif proses penyusunan maka perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaan lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan agenda serta jadwal yang ditetapkan;
 - b. bahwa telah diusulkan nama-nama personil yang oleh Perangkat Daerah pengusul mempunyai kemampuan untuk ditetapkan menjadi anggota Tim penyusun sebagaimana disebutkan dalam draft yang dilampirkan dengan Telaahan Staf yang disampaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2025 sampai dengan 2029;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah

Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 91);

7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 45);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 67);

Memperhatikan: Telaahan Staf Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: P-212/Diskominfo/000.7.207/2025 tanggal 16 Juli 2025, Perihal Permohonan Pembuatan SK Bupati untuk Tim Penyusun Renestra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sampai dengan 2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggung jawab:

1. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota Tim Penyusun;
2. memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Renstra;
3. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;

- b. Ketua:
 - 1. mengoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota Tim Penyusun;
 - 2. membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota Tim;
 - 3. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun kepada penanggung jawab;
 - 4. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;
- c. Anggota:
 - 1. mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas tahun lalu;
 - 2. melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program dan kegiatan Renstra Tahun 2025-2029;
 - 3. melakukan telaah terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - 4. merumuskan tujuan, Sasaran dan program kegiatan Kegiatan Dinas;
 - 5. merumuskan kegiatan prioritas Renstra Dinas;
 - 6. menampung hasil telaahan koreksi dan masukan atas Renstra masing-masing bidang;
 - 7. melaksanakan penyempurnaan Renstra Dinas hasil telaahan, koreksi dan masukan masing-masing bidang;
 - 8. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

KETIGA: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

- KEEMPAT: Honorarium diberikan kepada personil Tim yang tugas dan fungsi Perangkat Daerahnya tidak meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, dan memperhatikan batasan jumlah keanggotaan Tim sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta kriteria lainnya yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KELIMA: Pelaksanaan diktum KEEMPAT tersebut diatas menjadi tanggungjawab pengelola anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- KEENAM: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;
- KETUJUH: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Agustus 2025
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

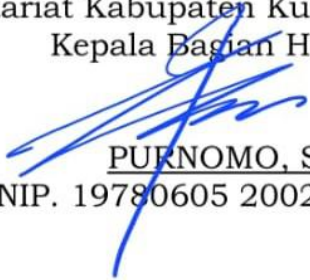
ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Assisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 216/SK-BUP/HK/2025 TANGGAL 4 AGUSTUS 2025
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025 SAMPAI
DENGAN 2029.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Penanggung Jawab: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- II. Ketua: Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
- III. Anggota:
 - 1. Kepala Bidang Aplikasi Informatika;
 - 2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - 3. Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 4. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 5. Kepala Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - 6. Donny Adiansyah,A.Md
Nip.197804242001121004
(Perencana Ahli muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
 - 7. Budian Noor
Nip.198308152010011035
(Penelaaah Teknis Kebijakan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI